

Cikudapapers

Februari 2017

vol.4

Volume 4, berisi 4 materi yang pernah terbit di situs online beberapa tahun kebelakang. Dialih bahasakan kedalam bahasa indonesia untuk mempermudah pembaca berbahasa indonesia memahami, seluk-beluk kawasan Timur-Tengah yang sangat konfliktual.

Satu materi di sajikan dengan perspektif marxian dalam membedah isu utama di balik pecahnya revolusi Suriah dan bagaimana kemudian negara-negara Teluk dan imperialisme barat mencoba membajak gerakan revolusioner ini.

Tiga materi lainnya membahas isu panas seperti revolusi Rojava, latar belakang kemunculan kelompok fasis bersenjata seperti ISIS di Timur-Tengah beserta peran negara-negara teluk beserta tuan mereka dari barat, dan pengimplementasian gagasan Murray Bookchin tentang Libertarian-Munisipalis kedalam dunia nyata yang merupakan obat penawar bagi kebuntuan sitem negara-bangsa dalam merespon konflik horizontal di Timur-Tengah dan kebutuhan mendesak rakyat untuk membentuk sistem demokrasi langsung sebagai penawar dari sistem beracun demokrasi parlementer yang selama ini di pakai dan di klaim sebagai satu-satunya sistem demokratis yang seharusnya di pakai di seluruh dunia.

Penyuntingan ulang kedalam bahasa indonesia menjadi sangat penting bagi pembaca indonesia untuk mengurai pita kusut konflik Timur-Tengah dan pencarian tak henti-hentinya untuk menemukan alternatif dari bentuk negara-bangsa diluar narasinya yang mereka jejalkan pada pikiran kita semua.

Akhir kata, semoga empat materi dalam edisi ini bisa merangsang pembaca untuk berpikir diluar kerangka berpikir yang sudah di seting oleh negara dan intitusi sosial sentralis lainnya.

Bandung,4 Februari, 2017

Membela Revolusi Suriah: Posisi Marxis Atas Revolusi Suriah dan Program "Anti-Imperialisme" Rezim Assad

oleh: Farshad Azadian dan Muhammed Elsalem



Hari ini adalah satu tahun sejak Rakyat Suriah bangkit melawan rezim Assad. Sejak Maret 2011, orang-orang Suriah menghadapi kebrutalan dari negara setalah gelombang demi gelombang demonstrasi massal, pemogokan dan pembangkangan sipil menyeruak ke permukaan. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kediktatoran, dan perlawanan atas ketidaksetaraan, pengangguran dan kemiskinan di dalam masyarakat Suriah.

Perkiraan jumlah penduduk sipil yang dibunuh oleh rezim tersebut berkisar antara 7.500 dan 9.000, menurut berbagai sumber, jumlah korban tewas meningkat setiap harinya. Selain itu, ada laporan bahwa banyak tentara yang menolak melakukan perintah untuk membunuh warga sipil telah dieksekusi. eksekusi, penyiksaan dan pemenjaraan massal telah menjadi metode yang digunakan oleh rezim Assad untuk mengekang gerakan revolusioner di Suriah.

Kebrutalan negara hanya telah melipatgandakan upaya kaum revolusioner. Revolusi Suriah, yang sebelumnya terbatas dalam kemampuannya untuk menyebarkan pengaruhnya hingga mencapai Damaskus dan Aleppo, telah berbalik selama beberapa bulan terakhir. Aleppo, pusat industri dan komersial Suriah, telah menyaksikan sebuah kampanye pembangkangan sipil massal dalam menanggapi seruan untuk melakukan pemogokan umum pada bulan Desember 2011. Salah satu yang terpenting adalah penyebaran gerakan tersebut ke Damaskus, ibu kota negara tersebut, yang merupakan sebuah benteng pertahanan rezim tersebut. Selama periode terakhir sebuah prosesi pemakaman massal yang diadakan di Damaskus, berubah menjadi demonstrasi besar-besaran. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam situasi politik yang mendukung revolusi di antara beberapa lapisan masyarakat.

Ribuan tentara dan perwira militer telah membelot dari rezim tersebut dan dengan cepat segera membentuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Tentara revolusioner ini telah digunakan untuk melawan aparatus negara lama dan melindungi para demonstran. Dalam menghadapi pembantaian warga sipil banyak pemrotes sipil memutuskan untuk bergabung dengan tentara revolusioner ini, sehingga dari 10.000 personil pasukan FSA menjadi 20.000

personil.

Di daerah-daerah tertentu, dan dalam jangka pendek, rezim lama kehilangan kendali politik dan muncul sebuah kecenderungan rakyat untuk membentuk sebuah Dewan Rakyat yang melaksanakan segala macam aktivitas, termasuk keamanan, perawatan kesehatan, mengadakan pengadilan rakyat, mendistribusikan makanan dan melindungi pengungsi yang melarikan diri dari represi rezim lama. Kami memiliki contoh dari hal itu meskipun berumur pendek di kota Zabadani, yang hanya berjarak 50 km dari Damaskus, di mana aparatus negara lama digantikan oleh Dewan Lokal Merdeka Kota Zabadani, yang mana dari setiap seribu penduduk kota dipilihlah seorang wakil oleh mereka yang nantinya akan di kirim ke dalam dewan kota. Dewan tersebut juga memiliki perwakilan dari minoritas agama dan para pembelot militer. Kota ini berada di bawah pemerintahan rakyat selama beberapa minggu sebelumnya, sayangnya, di bumi hangsukan oleh tentara Assad.

Dalam artikel ini, kami menguraikan apa yang kami yakini sebagai posisi apa yang seharusnya diambil oleh para marxist dalam kaitannya dengan revolusi Suriah, imperialisme dan tugas yang menanti dirinya dimasa depan. Adalah tugas kaum Marxist untuk mendukung orang-orang Suriah revolusioner dalam menggulingkan rezim Assad yang brutal, dan dengan sabar menjelaskan jalan mana yang seharusnya diambil dalam memandu rakyat Suriah menuju masa depan yang lebih baik.

Kita harus melihat kenyataan dan memahami bahwa revolusi Suriah memiliki banyak rintangan di depannya, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari apa yang disebut "kepemimpinan" dari gerakan itu sendiri. Kepemimpinan ini memiliki program politik yang tidak memenuhi kebutuhan nyata rakyat Suriah. Hasil dari program tersebut telah membatasi tindakan kelas pekerja melawan rezim tersebut, dalam bentuk pemogokan industri, yang dapat dengan mudah melumpuhkan rezim tersebut.

Hal Ini adalah sebuah elemen kunci dalam memahami mengapa revolusi belum dapat melangkah lebih jauh daripada yang diharapkan oleh banyak aktivis sebelumnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa rezim tersebut setidaknya telah berhasil menahan beberapa lapisan populasi rakyat untuk beralih ke dalam gerakan

revolusi, sehingga rezim Assad dapat mempertahankan basis massa untuk menahan laju gerakan revolusioner. Kita juga harus menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah sebuah kegagalan atas "kepemimpinan" dari gerakan revolusioner yang memungkinkan rezim Assad dapat melakukan hal seperti ini.

Agar revolusi Suriah akhirnya sukses mencapai apa yang dia perjuangkan, ia harus memenangkan hati dari lapisan masyarakat yang sangat menentukan gerakan ini kedepannya, khususnya massa kelas pekerja. Jika tidak, revolusi bisa berjalan berkepanjangan, atau bahkan gagal sama sekali. Dalam situasi seperti itu, kekosongan atas kepemimpinan tersebut telah berhasil diciptakan dan dipenuhi oleh kekuatan lain, elemen kontra-revolusioner, yang bertujuan untuk membajak gerakan rakyat yang asli dan mengeksploitasi kehendak rakyat sehinga merubahnya sesuai dengan agenda reaksioner mereka sendiri.

Kami juga menulis artikel ini untuk menunjukan posisi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang "kiri" yang telah mengambil sikap untuk mendukung rezim Assad berdasarkan retorika "anti imperialisme" yang di gembar-gemborkan oleh rezim ini. Posisi yang pada akhirnya secara konkret menjadi salah satu pelindung dari rezim assad yang kontra-revolusi yang ditangannya dipenuhi oleh darah ribuan martir revolusioner. Orang-orang ini salah menilai bahwa posisi mereka adalah sebuah gagasan Marxisme yang murni yang seharusnya dilakukan oleh setiap marxist, padahal sebenarnya tindakan ini adalah sebuah penyimpangan dari ide-ide Marx dan Lenin. Hal Ini tidak bisa dimaafkan, terutama pada saat gagasan Marxisme sangatlah relevan dengan perjuangan yang berani dari saudara-saudari kita di Suriah.

Kaum "Kiri" Yang Membela Kontra-Revolusi

Ini adalah fakta yang tidak menguntungkan bagi gagasan Marxisme bahwa beberapa organisasi, yang mengklaim dirinya sebagai organisasi "kiri", telah mengadopsi sebuah posisi yang mencerminkan propaganda rezim Assad di mana gerakan revolusioner suriah dipresentasikan sebagai "konspirasi imperialis" atau "pengambilalihan kaum Islam". Beberapa kelompok bahkan menggambarkan Tentara Pembebasan Suriah (FSA)

sebagai sekelompok preman. Begitu seseorang meninggalkan perspektif Marxis dalam menganalisis proses yang terjadi di Suriah, maka tidak mengherankan bahwa analisis yang terdistorsi semacam itu adalah hasilnya. Harus dikatakan secara blak-blakan bahwa mereka yang berposisi seperti itu secara konkret telah mengambil sisi sebagai kontra-revolusi.

Posisi tersebut diambil oleh beberapa publikasi seperti *Peoples Voice*, yang merupakan koran Partai Komunis Kanada (CPC), mencontohkan sikap yang tidak masuk akal ini. Dalam dua artikel yang diterbitkan di *People's Voice* (Vol 19, Edisi 2), majalah tersebut mengambil posisi vokal yang bertentangan dengan revolusi Suriah. mereka memperingatkan tentang "pembajakan pemberontakan rakyat oleh kekuatan-kekuatan yang didukung oleh imperialis yang menyamar sebagai kaum revolusioner", dan kemudian mengkritik dengan pedas terhadap Tentara Pembebasan Suriah, yang digambarkannya sebagai "kelompok paramiliter". Menurut *Peoples voice*, gerakan ini mencoba "mengusir Suriah dari posisi nasionalissnya yang anti-imperialis". Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa *Peoples Voice* menyerukan kepada rezim Assad untuk menjalankan sebuah reformasi. Mereka menyatakan, "konsesi serius atas kelas pekerja, termasuk pemberdayaan terhadap rakyat-pekerja kedalam satu front nasional yang kuat, dapat memperbaiki kekacauan ini."

Artikel-artikel mereka adalah sebuah pendistorsian atas posisi Marxis di Suriah, dan dapat menyesatkan pemuda dan pekerja yang berpikiran revolusioner di Kanada dan seluruh dunia. Hal ini juga dapat berkontribusi terhadap munculnya sebuah kecurigaan yang signifikan di antara massa Suriah dan kaum revolusioner terhadap kaum kiri pada umumnya. Kecurigaan ini bisa dimengerti mengingat ribuan orang telah terbunuh oleh rezim ini yang merupakan "pendukung komunis"

Karakter Revolusi

Gerakan massa di Suriah, sejak awal, diarahkan melalui badan-badan yang disebut "komite koordinasi lokal" yang merupakan kendaraan politik di akar rumput dan fungsional yang melaluinya gerakan anti-Assad berhasil di populerkan. Gerakan ini ada sebelum terbentuknya Tentara Pembebasan Suriah. Mereka

memiliki bobot politik penting dalam revolusi, dan mengendalikan sebagian besar situasi di lapangan. Mereka telah memberi gerakan ini kekuatan yang sangat penting, dan sampai saat ini berhasil mencegah terjadinya perang saudara berbasis etnis.

Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dibentuk melalui para pembelot tentara dan warga sipil yang memutuskan untuk mengangkat senjata melawan rezim tersebut. Gerakan ini dibangun sebagai respon langsung terhadap pembunuhan massal yang dilakukan polisi dan tentara terhadap demonstran yang tidak memiliki sarana untuk membela diri mereka sendiri. Selanjutnya, tentara yang menolak untuk melakukan perintah untuk menyerang para pemrotes dieksekusi sebagai "desertir". Jauh dari gangster yang digambarkan oleh *Peoples voice*, gerakan massa sangat mendukung FSA dan warga sipil berbondong-bondong bergabung sebagai relawan. FSA adalah ciptaan spontan revolusi, dan —jika memiliki kepemimpinan yang benar— berpotensi untuk secara langsung merongrong aparatus negara lama yang dapat secara langsung dikendalikan oleh masyarakat umum.

Tentu saja, FSA adalah sebuah tubuh yang heterogen, dan bukan tanpa kontradiksi tersendiri. Sama seperti semua revolusi Arab sebelumnya, ada kebingungan politik yang signifikan di kalangan rakyat Suriah. Kepemimpinan FSA telah bersikeras mengatakan pada tentaranya untuk tidak memiliki pandangan politik apapun dengan kedok supaya dapat mempertahankan persatuan diantara mereka.

Tapi bagaimana mereka bisa menuntut agar tentara dan relawan yang membelot ini tidak memiliki pandangan politik apapun? Mereka jelas khawatir bahwa mereka mungkin kehilangan kendali atas kekuatan tempur di lapangan. Faktanya adalah bahwa permasalah politik yang mendesak harus diperdebatkan dalam gerakan massa dan hal itu sangat penting untuk di kembangkan bagi program politik dan ekonomi dari gerakan ini.

Memang, justru dari ketidak jelas arahan politik Tentara Pembebasan Suriah (FSA) telah meninggalkan ruang terbuka yang siap untuk dibajak oleh kekuatan dari kalangan elit Suriah yang diwakili oleh Dewan Nasional Suriah (SNC).

Sekarang menjadi jelas bahwa kepemimpinan FSA memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap unit-unit tempurnya yang selama ini hampir tidak mendapatkan dukungan dari unit tempurnya di jalanan dan relawan sipil dalam gerakan tersebut. Dalam kekosongan kepemimpinan inilah, negara-negara Teluk mulai menyalurkan uang kepada kelompok-kelompok tertentu yang dapat memenuhi agenda reaksioner mereka sendiri. Namun, skala dari operasi ini masih belum jelas.

SNC adalah oposisi yang terorganisir dengan baik, dan di dalam nya terdapat kelompok-kelompok seperti *Ikhwanul Muslimin* dan borjuis "kaum liberal". Hal ini juga sangat terkait dengan kaum imperialis, yang menggunakannya sebagai instrumen untuk mendorong agenda mereka sendiri di dalam negeri Suriah. Namun, memang benar pula bahwa SNC tidak memiliki basis yang signifikan di jalanan Suriah dan hanya memiliki kontrol kecil atas perjuangan revolusioner di jalanan.

Sifat reaksioner SNC dapat disaksikan oleh seruan berulang-ulang untuk meminta intervensi negara asing di Suriah, sesuatu yang dapat dengan mudah dieksploitasi oleh Assad, mengingat sentimen anti-imperialis yang kuat di antara sebagian besar rakyat Suriah. Faktanya adalah SNC menolak untuk mendukung FSA selama berbulan-bulan, juga menunjukkan sebuah fakta lain bahwa tujuan mereka bukanlah untuk melakukan revolusi sosial dengan kekuatan nyata dari rakyat-pekerja, namun hanya sebuah perubahan rezim yang sesuai dengan kepentingan imperialisme, dimana kekuasaan politik akan di geser dari rezim sekarang ke rezim pro-barat, pro-kapitalis.

Karena itu, ada banyak kefrustrasian dan bahkan kemarahan yang berkembang terhadap SNC (dan bahkan kepemimpinan FSA pada batas tertentu) karena ketidakmampuannya untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan revolusi. Bahkan dalam hal bantuan kemanusiaan, SNC dianggap gagal. Merka telah menerima jutaan dolar untuk sumbangan, namun gagal memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang menetap di sekitara negara tetangga Suriah, kepada keluarga korban perang di dalam negeri, atau bahkan kepada pejuang FSA di yang berperang di jalanan.

Suasana hati rakyat kebanyakan semakin membenci atas kegagalan total SNC bahkan dalam tugas terkecil dalam memberikan bantuan kemanusian. Muncul sebuah sentimen di periode terakhir diantara rakyat bahwa kita "harus bergantung pada diri kita sendiri" dan bahwa "kita telah dibohongi". Hal ini menunjukkan bahwa di antara beberapa lapisan rakyat setidaknya ada kesadaran tehadap sifat sebenarnya dari SNC.

Faktanya mereka yang menyebut diri mereka sebagai "oposisi" justru telah berfungsi untuk melemahkan revolusi. SNC siap untuk meminta sebuah intervensi militer imperialis, sementara massa rakyat menentangnya dan memilih untuk mengangkat senjata, hal ini telah memperlihatkan peran sebenarnya dan kepentingan yang sebenarnya yang mereka pertahankan.

Sebenarnya hanya di bawah tekanan besar saja lah sehingga SNC terpaksa mengubah posisinya terhadap FSA. Hal ini dilakukan untuk alasan taktis sehingga dapat mempertahankan tingkat otoritas di mata rakyat Suriah. Hal ini telah menyebabkan pergeseran strategi, dari oposisi terhadap FSA, hingga upaya untuk mengendalikan FSA sepenuhnya. Dalam proses ini mereka secara jelas bertujuan untuk mengisolasi kaum revolusioner sejati dan mempromosikan unsur-unsur yang lebih reaksioner. Di Arab Saudi dan Qatar yang merupakan ujung tombak dari kekuatan kontra-revolusioner tengah mempromosikan agen mereka sendiri di dalam revolusi suriah untuk melemahkan dan memindahkannya ke arah kontra-revolusi seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia Arab dari Maroko sampai Bahrain. Hal ini menyebabkan munculnya sebuah konflik antara orang-orang yang bertempur di jalanan dan "pemimpin" mereka yang berada di pengasingan.

Jenderal Dempsey, Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika Serikat, baru-baru ini menyatakan bahwa dia yakin oposisi bersenjata di Suriah terkait dengan Al Qaida. Menurut Dempsey, AS seharusnya tidak memberikan bantuan militer kepada kaum revolusioner. Perwira militer berpangkat tertinggi di AS dapat mengeluarkan pernyataan semacam itu mennandai adanya sebuah indikasi kecurigaan kaum imperialis terhadap Tentara Pembebasan Suriah. Mereka tidak tahu siapa yang

mereka hadapi dan karena itu mereka tidak mempercayainya. Mereka menginginkan sebuah angkatan bersenjata yang dapat dipercaya untuk membentuk sebuah rezim baru yang didasarkan pada kepentingan imperialisme. mereka tidak melihat hal itu pada FSA.

Dapat di katakan, hanya seperti di Libya saja, akan menjadi logis bahwa Al Qaeda dan kelompok fundamentalis Islam lainnya akan berusaha menyusup ke dalam kekuatannya di dalam FSA, dan mengeksploitasi ketidak cakapan dari kepemimpinan revolusioner yang jelas untuk mendorong agenda reaksioner mereka sendiri. Dan justru inilah yang dieksploitasi rezim Assad dalam upayanya untuk menggambarkan keseluruhan oposisi sebagai reaksioner fundamentalis fanatik.

Independensi FSA dari kontrol langsung terhadap tubuh-tubuh seperti SNC adalah penyebab dari perhatian utama elit Suriah yang diorganisir di dalam SNC dan kekuatan imperialis lainnya. Sebenarnya, beberapa bagian kelas penguasa AS menganggap Assad sebagai mitra yang lebih bisa diandalkan di kawasan ini. Mereka takut pada revolusi Suriah dan khawatir bahwa Suriah pasca-Assad mungkin kurang bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Partai Komunis Kanada, ketika mengutuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA), sebenarnya telah mengambil posisi yang sangat mirip dengan kaum imperialis, meski menggunakan retorika omongkosong tentang anti-imperialis.

Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, SNC secara aktif berusaha mengendalikan kepemimpinan dalam tubuh FSA. Meskipun "netralitas" pandangan politik FSA, beberapa pemimpinnya - mengabaikan seruan mereka sendiri atas sikap non-politisnya dan dengan secara terbuka telah menyerukan pembentukan zona "*no-fly zones*". Hal Ini mencerminkan keputusasaan dan kelemahan militer mereka dalam menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul dari rezim Assad, namun kemudian hal ini adalah posisi yang benar-benar salah, dan benar-benar dapat dimainkan oleh tangan Assad, yang berusaha menggambarkan revolusi tersebut sebagai sebuah rencana yang dibuat oleh kaum imperialis. Ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada program politik yang jelas dimana orang-orang Suriah mengandalkan pemimpin

mereka, usulan reaksioner dapat muncul dikemudian hari. Untuk memanggil imperialis dari luar melakukan intervensi militer adalah pengkhianatan langsung terhadap revolusi.

Terlepas dari kelemahan kepemimpinan ini, perkembangan dari organisasi rakyat bersenjata merupakan langkah penting dan progresif. Namun, rezim Suriah, dengan tentaranya yang jauh lebih canggih, telah berjuang untuk dapat mengalahkan secara langsung tentara revolusioner ini, telah menjadi sebuah bukti bahwa rakyat mendukung FSA hal ini mengindikasikan dengan tepat sebuah fakta bahwa FSA bukan kelompok preman paramiliter, seperti yang di tuduhkan semua orang selama ini. Tanpa dukungan massa-rakyat, FSA tidak akan bertahan dalam seminggu melawan tentara yang jauh lebih unggul di bawah komando Assad.

Namun, revolusi telah mengalami beberapa kemunduran yang serius, khususnya di Homs dan Idlib, yang merupakan benteng pertahanan revolusi. Perang sipil, yang pada awalnya dapat di redam, sekarang menjadi lebih berbahaya karena rezim Assad dapat mengeksploitasi kelemahan dari revolusi dan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka di dalam garis-garis konflik berlandaskan etnis dan agama. Pembantaian terakhir Karm Al-Zeitoun di Homs di mana anggota milisi Aliwaite dilaporkan telah memperkosa dan membunuh 50 wanita dan anak-anak Sunni telah memprovokasi reaksi balik sektarian besar-besaran karena kemarahan para korban ditujukan kepada orang-orang Alawi (syiah) pada umumnya. Ini jelas merupakan kebijakan rezim Assad untuk memperkuat dukungan di antara orang-orang Alawi, yang pada gilirannya akan merasa terancam oleh revolusi! Kemungkinan pertumpahan darah antar sektarian menjadi lebih nyata setiap harinya dan hal ini adalah sebuah bahaya yang sangat nyata terutama karena milisi dari rezim Assad melakukan pembunuhan sistematis di Homs. Rezim reaksioner regional, seperti Arab Saudi, juga terlibat dalam konflik etnis ini. Sejak mereka belum dapat mengendalikan situasi di Suriah, mereka lebih suka menghancurkan situasi tersebut menjadi berkeping-keping sehingga mereka bisa masuk dan mengambil bongkahannya untuk diri mereka sendiri dan memecah belah rakyat suriah.

Kaum Imperialis Berebut Untuk Suriah

mereka, usulan reaksioner dapat muncul dikemudian hari. Untuk memanggil imperialis dari luar melakukan intervensi militer adalah pengkhianatan langsung terhadap revolusi.

Terlepas dari kelemahan kepemimpinan ini, perkembangan dari organisasi rakyat bersenjata merupakan langkah penting dan progresif. Namun, rezim Suriah, dengan tentaranya yang jauh lebih canggih, telah berjuang untuk dapat mengalahkan secara langsung tentara revolusioner ini, telah menjadi sebuah bukti bahwa rakyat mendukung FSA hal ini mengindikasikan dengan tepat sebuah fakta bahwa FSA bukan kelompok preman paramiliter, seperti yang di tuduhkan semua orang selama ini. Tanpa dukungan massa-rakyat, FSA tidak akan bertahan dalam seminggu melawan tentara yang jauh lebih unggul di bawah komando Assad.

Namun, revolusi telah mengalami beberapa kemunduran yang serius, khususnya di Homs dan Idlib, yang merupakan benteng pertahanan revolusi. Perang sipil, yang pada awalnya dapat di redam, sekarang menjadi lebih berbahaya karena rezim Assad dapat mengeksploitasi kelemahan dari revolusi dan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka di dalam garis-garis konflik berlandaskan etnis dan agama. Pembantaian terakhir Karm Al-Zeitoun di Homs di mana anggota milisi Aliwaite dilaporkan telah memperkosa dan membunuh 50 wanita dan anak-anak Sunni telah memprovokasi reaksi balik sektarian besar-besaran karena kemarahan para korban ditujukan kepada orang-orang Alawi (syiah) pada umumnya. Ini jelas merupakan kebijakan rezim Assad untuk memperkuat dukungan di antara orang-orang Alawi, yang pada gilirannya akan merasa terancam oleh revolusi! Kemungkinan pertumpahan darah antar sektarian menjadi lebih nyata setiap harinya dan hal ini adalah sebuah bahaya yang sangat nyata terutama karena milisi dari rezim Assad melakukan pembunuhan sistematis di Homs. Rezim reaksioner regional, seperti Arab Saudi, juga terlibat dalam konflik etnis ini. Sejak mereka belum dapat mengendalikan situasi di Suriah, mereka lebih suka menghancurkan situasi tersebut menjadi berkeping-keping sehingga mereka bisa masuk dan mengambil bongkahannya untuk diri mereka sendiri dan memecah belah rakyat suriah.

Kaum Imperialis Berebut Untuk Suriah

Untuk memahami hubungan imperialisme dengan Assad, sangat penting untuk meneliti sejarah dan perkembangan ekonomi Suriah. Nanti kita simak hal ini secara lebih rinci. Sederhananya, ekonomi Suriah pada satu titik sebagian besar direncanakan pada upaya nasionalisasi. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, Assad mengadopsi "Model Cina" untuk pemulihan kapitalisme, yang mengakibatkan perluasan properti pribadi secara besar-besaran, investasi asing yang lebih besar, dan menghasilkan ketidaksetaraan yang tumbuh di Suriah. Ini adalah faktor penting yang menyebabkan revolusi saat ini pecah. Label "anti-imperialisme" dan "progresif", yang dikenakan oleh rezim Assad, oleh karena itu sama sekali salah. Paling banter, Assad pada saat-saat tertentu dalam beberapa tahun terakhir Assad memiliki kepentingan yang bertentangan dengan beberapa bagian imperialis dunia tertentu, sambil bersandar mesra pada bagian yang lain tentunya.

Hubungan Assad dengan presiden Rusia Putin yang telah datang membantu rezim tersebut dan telah mendukung kekerasan kontra-revolusionernya adalah sebuah contoh kasus yang paling nyata. Rusia memiliki kepentingan ekonomi utama di Suriah, baik dari segi investasi maupun dalam hal perdagangan senjata. Rusia juga memiliki kepentingan strategis di Suriah, yang memungkinkan angkatan laut dan angkatan bersenjata Rusia dapat menggunakan wilayahnya. Inilah kepentingan imperialis yang sinis dan sempit dari kelas kapitalis Rusia yang telah dengan dermawannya menggelontorkan bantuannya ke Suriah.

Tidak diragukan lagi bahwa benar berbagai negara imperialis ikut campur dalam pergolakan di Suriah hari ini. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan, mengingat kepentingan ekonomi mereka di Timur Tengah, dan posisi strategis di Suriah. Berbagai kekuatan imperialis berebut untuk menegaskan kepentingan mereka sendiri di Suriah. Orang-orang Rusia, Tiongkok dan Iran secara terbuka berpihak pada rezim Assad, dan memberikan bantuan militer kepadanya.

Di sisi lain, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Negara-negara Teluk Arab dan berbagai kekuatan NATO terbagi pandangannya atas bagaimana menghadapi kondisi di Suriah. Kekuatan imperialis yang sama di masa lalu ini senang berbisnis

dengan Assad, dan menanggapi dengan sangat positif program liberasinya dan bantuannya dalam menciptakan "stabilitas" di Kawasan ini. Sekarang mereka merasa bahwa hari-hari Assad tinggal menghitung hari. Inilah sumber dari posisi kontradiktif kekuatan kaum imperialis ini. Mereka khawatir Suriah pasca-Assad, tapi juga berusaha untuk menegaskan pengaruhnya di dalam gerakan yang nampaknya pada akhirnya akan menggulingkan Assad untuk melindungi kepentingan mereka di negara tersebut.

Ini adalah bahaya serius bagi revolusi Suriah. Kaum imperialis Barat, dan sekutunya di Negara-negara Teluk, berusaha membajak dan menggagalkan gerakan revolusioner. Intervensi mereka di Suriah, yang mencakup hubungan mereka dengan Dewan Nasional Suriah (SNC), telah menciptakan kebingungan dan telah melemahkan revolusi sosial di Suriah. Hal Ini juga telah memperkuat rezim Assad dengan membantunya membenarkan represi atas gerakan tersebut. Adalah tugas kaum Marxis untuk mengekspos pengaruh imperialis dalam revolusi Suriah.

Setelah Assad jatuh, elite Suriah dan kaum imperialis akan khawatir untuk menegaskan kembali kepentingan mereka dan secara efektif mempertahankan tatanan lama, dan mengukir kekayaan negara tersebut. Mereka khawatir bahwa rakyat bersenjata dan kaum revolusioner akan menjadi hambatan utama bagi tujuan ini.

Meninggalkan perspektif revolusioner

Posisi yang diambil oleh Partai Komunis Kanada (CPC), seperti banyak yang menyebut dirinya Komunis di seluruh dunia, di tengah revolusi saat ini adalah menegaskan bahwa rezim Assad "secara objektif anti-imperialis", yang seharusnya, bagaimanapunjuga, memberlakukan reformasi yang pro-pekerja. Ini adalah posisi yang absurd, yang paling abstrak. Assad jelas-jelas melakukan kontra-revolusi yang brutal, dan CPC meminta kekuatan kontra-revolusi ini untuk melaksanakan reformasi sosial yang pro-pekerja. Justru rezim Assad yang telah melakukan reformasi yang anti-kelas pekerja dan proses liberalisasi, dan membalikkan banyak kemenangan bersejarah yang dimenangkan oleh massa rakyat pekerja di Suriah. Untuk menciptakan ilusi bahwa Assad

akan melakukan reformasi semacam itu yang paling banter dapat membingungkan semua orang.

Untuk membuat permintaan semacam itu agar Assad melakukan reformasi dalam konteks saat ini berarti berpihak pada kontra-revolusi. Ratusan orang Suriah terbunuh setiap harinya di tengah perjuangan revolusioner ini. Bagi Assad untuk melaksanakan reformasi yang diminta oleh CPC, pertama-tama yang harus dilakukannya adalah menghancurkan gerakan massa itu sendiri. Tidak peduli seberapa besar posisi ini direndahkan, Assad telah melakukan pembunuhan massal yang kontra-revolusioner, dan CPC mendukungnya.

Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat internasionalisme dan mencerminkan ditinggalkannya teori Marxisme. Posisi CPC yang mengacu pada rezim Assad untuk melakukan reformasi dan membangun "front nasional yang kuat" sangatlah merusak mengingat peran organisasi saudaranya, Partai Komunis Suriah, yang menjadi mitra setia rezim Assad di dalam Front Nasional Progresifnya. Partai Komunis Suriah (SCP) telah berpuluh-puluh tahun mendukung rezim tersebut saat melakukan penindasan yang paling parah (termasuk melawan SCP sendiri!), Dengan penghancuran total organisasi pekerja yang independen, institusi sistem satu partai dan melakukan program liberalisasi, salah satunya privatisasi di dalam negeri. Sementara kadang-kadang meningkatkan kritikannya (sebagaimana artikel dalam *Peoples Voice* telah dilakukan), kaum Stalinis telah memainkan peran berbahaya di Suriah. hal ini telah membuat usaha revolusioner sejati semakin sulit, karena ia telah mengirimkan sebuah pesan bahwa semua orang-orang "kiri" di dunia telah mendukung rezim Assad!

Posisi kriminal yang diambil oleh mereka yang menyebut dirinya "komunis", yang berakar pada ideologi Stalinis mereka, yang sangat serius telah merusak nama "komunis" di kalangan massa tepat ketika gagasan Marxis sejati sangat relevan terhadap orang-orang Suriah hari ini. Tugas Marxis sejati adalah untuk mengekspos upaya kaum imperialis untuk membajak revolusi. Lebih jauh lagi, revolusi Suriah sangatlah membutuhkan gagasan Marxis jika ingin berhasil mewujudkan demokrasi yang sejati, dan

memecahkan kebutuhan ekonomi dan sosial yang sangat mendesak bagi rakyat suriah. Hanya sebuah sosialis Suriah, yang didasarkan pada kontrol demokratis pekerja terhadap ekonomi yang dinasionalisasi, dapat memecahkan kontradiksi dalam masyarakat Suriah yang menyebabkan mereka turun ke jalan.

Partai Komunis Kanada (CPC) bukanlah satu-satunya kecenderungan sayap kiri yang telah mengemukakan semua kegilaan ini, atau sebuah posisi yang serupa dalam kaitannya dengan Suriah. Kami berfokus pada CPC karena posisi vokalnya dalam hal ini, dan karena posisi ini diadopsi oleh organisasi saudaranya di Suriah, Partai Komunis Suriah, yang telah memainkan peran yang sangat negatif dalam peristiwa revolusioner di negara tersebut.

Setelah memaparkan hal ini, perlu juga membedakan antara kepemimpinan sebuah organisasi seperti Partai Komunis Suriah dan anggota biasa yang tersisa dan Komunis muda yang telah secara aktif berpartisipasi dalam gerakan tersebut secara luas. Dan mengapresiasi mereka, karena mereka telah berpihak pada revolusi, dan bekerjasama di antara lapisan rakyat. Disinilah kita akan menemukan beberapa para buruh dan aktivis muda yang dapat memainkan peran kunci dalam menyebarkan gagasan Marxisme sejati.

Hal ini memang berada di luar cakupan artikel ini, namun perlu dicatat juga, bahwa "logika" serupa perlu diterapkan kepada beberapa "kaum kiri" ke Syria dan juga situasi di Iran hari ini serta Libya di bawah Gaddafi, di mana mereka mengelabui kita semua dengan istilah dari rezim mereka yang “anti-imperialis”.

Tujuan kami adalah untuk mengklarifikasi tradisi asli Marxisme dan Leninisme, yang relevan dengan situasi di Suriah, dan untuk menghilangkan semua kebingungan yang mungkin ada di kalangan revolusioner sejati mengenai isu penting ini. Oleh karena itu, di Bagian Dua dari artikel ini, kami akan menguraikan faktor historis dan sosial yang telah berkontribusi pada revolusi Suriah, dan program politik yang dengannya para revolusioner di Suriah harus mempersenjatai diri mereka untuk memastikan kekalahan Assad dengan cepat.

Bagain ke-dua

Banyak kebingungan ada muncul mengenai sifat sebenarnya dari rezim Suriah karena apa yang terjadi di masa lalu. Pada tahun 1960 setelah sebuah kudeta Ba'athist, bidang ekonomi ditransformasikan, mengadopsi model Uni Soviet khas Stalinis. Meski progresif dalam hal tindakan yang dilakukan, rezim ini tidak didasarkan pada demokrasi buruh. Kekuasaan berada di tangan elit birokrasi, dan dalam hal ini membahayakan pembalikan langkah-langkah progresif dan kembalinya hubungan dengan kaum kapitalis.

Namun, perencanaan rezim lama dan kebijakan nasionalisasi dunia ekonomi, meski dikendalikan secara birokratis, berfungsi untuk mengembangkan ekonomi Suriah dan juga mencerminkan atas peningkatan standar hidup bagi rakyat Suriah ... untuk sementara.

Sebelum pengalaman ini terjadi, pernah muncul sebuah persatuan yang berumur pendek dengan Mesir. Serikat pekerja didirikan pada tahun 1958 dan muncul pada tahun 1961, ketika Suriah memisahkan diri. Pada tahun 1957 Suriah memiliki Partai Komunis yang sangat terorganisir. Namun, Nasser (Presiden Mesir) lah yang memberi tahu pemerintah Suriah bahwa mereka perlu menyingkirkan orang-orang komunis tersebut.

Sebenarnya persatuan dengan Mesir dianggap oleh kaum borjuis Suriah sebagai alat untuk mencegah perkembangan kaum revolusioner di dalam negeri. Ada dukungan massa di Suriah untuk persatuan dengan Mesir karena popularitas Nasser, yang merupakan seorang yang anti-komunis, pada saat yang bersamaan mendorong sebuah program nasionalisasi dan reformasi yang sangat progresif.

Ironisnya, program nasionalisasi Nasser inilah yang mendorong kapitalis Suriah untuk mengatur sebuah rencana untuk memecahkan diri dari persekutuan diantara Mesir dan Suriah sebagai sarana untuk mempertahankan pemerintahan dan kekayaan mereka. Pada tanggal 28 September 1961, pejabat tentara melakukan kudeta dan memutuskan persekutuan ini. Ketidakstabilan politik berikutnya terjadi pada tahun 1963 ketika partai Ba'athist, yang memiliki anggota beberapa bagian-bagian perwira militer di Suriah, mencamplok kekuasan melalui sebuah kudeta militer.

Kebangkitan Rezim Assad

Pada bulan Januari 1965, pemerintah Partai Sosialis Ba'ath menasionalisasi 106 perusahaan industri dan bank. Kaum kapitalis berusaha untuk melawan dan mengatur sebuah rencana kontra-revolusi. Hal ini memaksa pemerintah Ba'ath untuk menarik hati para pekerja dan petani untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Menanggapi hal tersebut ribuan petani dan pekerja menyerbu Damaskus untuk mendukung langkah-langkah pemerintah.

Dalam prosesnya, sistem pemerintahan kapitalisme dihabisi dan sebuah rezim yang dimodelkan di Uni Soviet dipasang. Ini berarti bahwa sementara ekonomi diambil alih oleh negara dan direncanakan secara terpusat, tidak ada kontrol pekerja tapi sebuah birokrasi berdiri di atas para pekerja dan petani. Awalnya, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan ekspansi sekitar 80% di tahun 1960an dan lebih dari 300% di tahun 1970an.

Dari tahun 1963 sampai 1970, serangkaian konflik dan pembunuhan antar kelompok militer melihat bangkitnya Hafez Al-Assad untuk berkuasa. Dengan demikian dibentuklah peraturan satu partai melalui Partai Ba'athist dari tahun 1970 sampai sekarang.

Ketika Hafez meninggal pada tahun 2000, kepresidenan di wariskan kepada sang anak, Bashar Al-Assad, yang terus memerintah hingga hari ini. Hafez Al-Assad mewakili sayap Partai Ba'athis yang lebih konservatif, dan sebenarnya dia menghentikan program nasionalisasi dan berjanji pada kepentingan para pembisnis bahwa dia akan melindungi properti mereka. Namun, Hafez mempertahankan industri-industri yang telah dinasionalisasi selama dua dekade pertama ini.

Partai Ba'athist, meskipun menggambarkan dirinya sebagai penganut Sosialisme-Arab, memusatkan industri yang dinasionalisasi dalam cengkeraman kelompok kecil di puncak pyramid masyarakat. Tidak ada tingkat kontrol ekonomi yang demokratis oleh para pekerja. Ba'athists Suriah menekan setiap usaha pekerja untuk membangun organisasi independen, dan sangat menekan organisasi komunis.

Namun, perekonomi yang dinasionalisasi memberikan manfaat penting bagi masyarakat dalam hal lapangan kerja, akses terhadap komoditas, perumahan dan pelayanan sosial. Hal ini

memberikan beberapa stabilitas pada rezim Assad dan juga memberikan dasar dukungan di antara bagian-bagian penting dari populasi selama tahun 1960an-1980an. Meskipun demikian, hak istimewa yang luar biasa diberikan kepada kalangan birokrasi yang berkuasa di dalam rezim tersebut, sebuah proses yang dimulai pada tahun 1960an dan berlanjut higga era Assad.

Ketika Hafez Al-Assad mengambil alih kekuasaan pada tahun 1970, dia juga sangat bergantung pada eksploitasi dan perpecahan sektarian dalam masyarakat Suriah. perpecahan ini telah diciptakan dan diperkuat oleh Kekaisaran Ottoman sebelumnya, dan imperialis Prancis berikutnya, dalam taktik klasik "*divide and rule* ". Namun, terencana dan pembangunan ekonomi berkelanjutan memberikan tingkat stabilitas dalam suatu periode.

Hal Ini tidak berlangsung lama, bagaimanapun juga, karena kontrol birokrasi menunjukkan semakin banyak keterbatasannya. Ketidakstabilan kemudian menciptakan kebutuhan untuk memberi makan dan menyegarkan kembali konflik sektarian sebagai alat untuk mempertahankan kontrol. Perpecahan ini terutama terjadi diantara, tidak hanya kelompok agama Alawi dan mayoritas penduduk Sunni, namun juga dengan populasi Kristen dan Kurdi di negara tersebut.

Al-Assad menggunakan "sekularisme" yang seharusnya-nya sebagai sarana untuk benar-benar menghasut perpecahan etnik di Suriah. Dia menempatkan dirinya sebagai pembela agama minoritas terhadap mayoritas Sunni, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan basis dukungan di kalangan kelompok Alawi dan Kristen yang merupakan bagian populasi yang signifikan jumlahnya (hari ini keduanya adalah 20% dari keseluruhan populasi rakyat Suriah). "Sekularisme" sektarian ini digunakan untuk menekan kelompok oposisi dan mayoritas Sunni. Meskipun menggunakan frase sekuler, Assad sangat bergantung pada pemimpin agama Kristen dan Islam untuk mempertahankan kendali atas massa rakyat pekerja

Kapitalisme Bashar Assad dan ketidaksetaraan di masyarakat Suriah

Pada awal 1990an, rezim Assad mulai mengubah kebijakannya menjadi salah satu kebijakan liberalisasi yang sangat

signifikan untuk mendorong investasi asing ke Suriah dan untuk memperluas sektor swasta. Hal ini terutama dipercepat pada tahun 2000an, dengan ekspansi perbankan swasta dan bisnis. Kelompok birokrasi yang berkuasa, yang memimpin sebagian besar ekonomi nasional menyadari bahwa mereka dapat meningkatkan penjarahan mereka dengan memperluas investasi kapitalis ke negara tersebut.

Langkah menuju perluasan kapitalisme di Suriah terjadi dalam konteks politik jatuhnya rezim Stalinis di Uni Soviet dan pemulihan kapitalisme di Blok Timur (1989-91). Hafez Al-Assad, yang pernah menjadi sekutu birokrasi Stalinis di Rusia, ditinggalkan tanpa memiliki kekuatan besar untuk bersandar.

Kelompok Suriah yang berkuasa, yang terinspirasi oleh model pemulihan kapitalisme Tiongkok mulai melakukan reformasi serupa melalui program privatisasi, mengakhiri subsidi dan membuka diri terhadapa negara Barat dan negara-negara imperialis lainnya. Birokrasi negara lama, seperti di Tiongkok telah mengubah basis ekonominya dari ekonomi yang dimiliki negara, yang direncanakan di mana bagian-bagian sektor milik negara lama telah diprivatisasi untuk kepentingan anggota rezim itu sendiri dan "pasar" telah diizinkan untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai hasil dari liberalisasi ekonomi ini, kesenjangan antara orang kaya dan miskin Suriah meningkat secara besar-besaran.

Perkiraan jumlah orang Suriah yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 33% sampai 40%, dengan yang "ekstrim miskin" yang didefinisikan sebagai tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, berdiri sekitar 13%. Pengangguran melonjak menjadi 20%, dan jauh lebih tinggi di kalangan para pemuda. Justru karena program privatisasi inilah, pemotongan subsidi dan pemotongan layanan sosial yang menyebabkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan diri mereka sangat puas dengan kediktatoran Assad. Kemarahan pada ketidaksetaraan di kalangan rakyat yang terus menganga ini merupakan faktor signifikan yang memicu revolusi yang meletus di tahun 2011.

Liberalisasi ekonomi ini bertentangan langsung dengan kredensial "progresif" yang oleh beberapa orang sayap kiri

dikaitkan dengan rezim Assad. Pembukaan pasar dalam negeri Suriah terhadap perusahaan asing menyebabkan kaum imperialis berduyun-duyun merapatkan diri kepada Assad. Misalnya Suncorp, perusahaan energi Kanada yang memiliki Petro-Canada, memiliki 1,2 miliar dolar yang diinvestasikan dalam bentuk ekstraksi sumber daya gas alam Suriah. Investor signifikan lainnya yang masuk ke Suriah termasuk Royal Dutch Shell (Inggris), Total S.A. (Prancis), China National Petroleum Company, Stroytansgaz (Rusia) dan Oil and Gas Corporation (India). Perusahaan otomotif Iran, seperti kelompok Saipo, juga telah berinvestasi di pabrik manufaktur mobil di Suriah. Juga ada perluasan besar dunia perbankan swasta dengan pemangku kepentingan besar termasuk bank-bank besar Kuwait dan Saudi. Selanjutnya, Rusia juga memiliki saham penting di negara ini, karena Suriah menyediakan wilayahnya untuk pangkalan angkatan laut Rusia di wilayahnya dan juga perdagangan senjata yang besar dengan negara tersebut. Kebijakan Assad untuk membuka perusahaan asing secara langsung bertentangan dengan pandangan bahwa dia menjalankan kebijakan yang anti-imperialis.

Rami Makhlouf adalah salah satu individu paling berpengaruh di Suriah dan anggota lingkaran dekat Assad. Dia memiliki kontrol yang hampir sepenuhnya atas investasi asing ke dalam negeri dan memiliki Syriatel, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara ini. Menurut *Financial Times*, dia mengendalikan 60% ekonomi Suriah, dengan kepentingan bisnis di bidang telekomunikasi, minyak dan gas, konstruksi, perbankan, penerbangan dan ritel.

Kelompok Assad telah membuat perubahan signifikan pada ekonomi Suriah untuk memperluas kepemilikan pribadi. Hal ini membuat lapisan kecil orang suriah sangat kaya raya. Ketidaksetaraan ditampilkan, misalnya, ketika perusahaan mobil mewah asal Italia, Maserati, meluncurkan jajaran kendaraan dengan harga tinggi di Damaskus pada tahun 2010. Penjualan mobil mewah ini sebenarnya telah laku keras di Suriah.

Suriah telah menjadi masyarakat kapitalis di mana sebagian besar ekonomi berada di tangan sebuah klik mafia di sekitaran rezim Assad. Privatisasi harus dilakukan dengan mengubah anggota rezim menjadi pemilik bagian

penting ekonomi. Namun, proses liberalisasi ini belum selesai, dan masih ada sektor negara yang penting lainnya yang belum di liberalisasi.

Ini berarti bahwa ada lapisan baru yang memperoleh keuntungan dari pengenalan hubungan kapitalis, dan lapisan ini mengidentifikasi diri masih berada di sekitaran rezim. Tapi masih ada lapisan yang diuntungkan dari sektor ekonomi yang di miliki negara. Kedua gabungan lapisan masyarakat ini telah memberikan Assad dukungan yang berlimpah. Namun, untuk sebagian besar penduduk, keuntungan dari era sebelumnya telah di hilangkan.

Hasilnya adalah Suriah yangmana kepentingan mayoritas terbengkalai sementara keuntungan bisnis besar (termasuk kepentingan kaum imperialis) dilindungi. Mereka yang bersikeras bahwa rezim Bashar Al-Assad adalah anti-imperialis memiliki pandangan yang sangat delusional terhadap masyarakat Suriah.

Hubungan Assad dengan imperialisme Israel dan AS

Pertama-tama Hafez Al-Assad, dan kemudian putranya penguasa saat ini Bashar, secara teratur bergabung dalam aliansi dengan imperialis Barat. Mereka telah memainkan peran kontra-revolusioner dalam menekan pemberontakan massal di Libanon dan bergabung dengan kekuatan imperialis regional, dia juga merupakan mitra yang paling terbuka saat invasi George Bush Sr. ke Irak pada tahun 1991 dan telah memainkan peran kolaboratif dalam apa yang disebut "*War on Teror* ". Jauh dari citra yang di gambarkan oleh orang orang kiri bahwa Assad adalah rezim yang anti-imperialis, dia telah menjadi mitra regional dengan imperialisme dan telah memainkan peran destruktif dalam kaitannya dengan gerakan sayap kiri di kawasan tersebut, terutama di libanon.

Selama perang sipil Libanon, dari tahun 1975-1990, rezim Suriah terlibat secara langsung untuk menekan gerakan sayap kiri revolusioner, terutama yang diwakili oleh kelompok sayap kiri Palestina dan Partai Komunis Libanon. Assad mendukung rezim sayap kanan Maronite dan regu paramiliter kanan yang digunakan untuk menenggelamkan gerakan revolusioner dalam kubangan darah.

Dari sudut pandang rezim

Suriah, gerakan sayap kiri di negara tetangga merupakan ancaman yang bisa jika sampai menyebar ke Suriah. Assad juga ingin membangun dan mengkonsolidasikan pengaruhnya di Libanon. Kelompok bersenjata Suriah dan yang didukung secara langsung oleh pemerintahan Assad ikut campur dalam perang sipil. Mereka juga secara aktif mendorong perpecahan sektarian, seperti yang dilakukan Assad di rumahnya sendiri di Suriah. Selama pertengahan hingga akhir tahun 1970an, mereka mampu menekan Partai Komunis Libanon dan kelompok revolusioner Palestina. Setelah berhasil menghancurkan kelompok sayap kiri di Lebanon, mereka berbalik untuk menghancurkan kelompok kiri di Suriah, termasuk Partai Buruh Komunis dan Partai Komunis Suriah.

Sepanjang perang saudara di Libanon, Suriah dan Israel membentuk sebuah faksi dengan kontrol yang signifikan atas negara tersebut. Meskipun Suriah dan Israel memiliki kepentingan yang terkadang saling bertentangan, mereka bersatu untuk berbagi kekuasaan di Libanon dan menenggelamkan gerakan revolusioner dalam kubangan darah.

Kesediaan untuk ikut bekerja sama dengan imperialisme juga ditunjukkan saat Hafez Al-Assad membuat aliansi dengan George Bush Senior selama invasi ke Irak pada tahun 1991 setelah Saddam masuk ke Kuwait. Pasukan Suriah mendukung invasi pimpinan AS ke Irak selama Perang Teluk. Pasukan militer Suriah memang tidak memasuki konflik secara aktif, namun mereka memberikan dukungan logistik dan menyediakan pasukan cadangan untuk pasukan invasi AS. Lebih dari 100.000 tentara Irak tewas dalam perang imperialis ini.

Sejak "*War on Terror*" yang dimulai pada tahun 2001, rezim Suriah telah menampilkan dirinya sebagai sekutu regional Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat dan Kanada mulai menargetkan dan mengamati beberapa kelompok teroris tertentu. Upaya ini mencakup penargetan dan penindasan yang lebih luas terhadap orang-orang dari Timur-Tengah. Rezim Assad, dengan pengalamannya menindas *Ikhwanul Muslimin* di Suriah, dipandang sebagai sekutu yang berguna dalam usaha ini.

Kasus Mahar Arar, seorang warga Kanada-Suriah, yang disiksa di Suriah juga menunjukkan jenis

anti-imperialisme yang dianut oleh rezim Assad. Pada tahun 2003 Mahar Arar, warga negara Kanada, diculik dalam perjalanan liburannya. Dilaporkan bahwa *Central Intelligence Agency* (CIA), dengan bantuan *dari Royal Canadian Mounted Police* (RCMP), mencurigainya terlibat dalam aktivitas teroris. CIA mengangkut Arar dengan pesawat ke Syria untuk diinterogasi. Arar ditahan dan disiksa selama dua tahun sampai pada akhirnya dengan jelas membuktikan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan organisasi teroris manapun. Akibatnya, interogasi dan penyiksaan terhadap tahanan yang diambil oleh CIA dan RCMP dilemparkan tanggung jawabnya kepada Assad di Suriah.

Posisi Marxis pada revolusi Suriah

Revolusi Suriah adalah proses yang sangat kontradiktif. Seperti dalam revolusi apapun, jutaan orang telah memasuki aktivitas politik untuk pertama kalinya. Setahun telah berlalu sejak gerakan dimulai, dan massa telah menunjukkan kepahlawanan besar dalam menghadapi kebrutalan Assad. Tuntutan yang diangkat oleh gerakan ini, pada tahap ini, sebagian besar bersifat demokratis.

Fakta ini seharusnya tidak mengarah pada pandangan yang terdistorsi tentang revolusi. Kemiskinan, pengangguran dan kenaikan biaya hidup yang besar, ditambah dengan ketidaksetaraan dan pemborosan yang ditampilkan oleh lingkaran penguasa seputaran rezim merupakan faktor utama yang menyebabkan revolusi. Pada tahap sekarang, tuntutan demokrasi dilihat oleh massa sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Fakta bahwa penindasan tentara Assad selama beberapa bulan terakhir telah difokuskan pada berbagai lingkungan kumuh kelas pekerja yang menunjukkan komposisi kelas dalam gerakan tersebut. Fakta lainnya adalah bahwa pemrotes telah menyerang aset dari kelompok yang berkuasa, seperti Corporation Syria milik Makhlouf, menunjukkan kemarahan yang terbakar pada ketidakadilan secara ekonomi.

Menghadapi keruntuhannya, Assad telah berusaha keras untuk membuat "konsesi". Banyak di antaranya bersifat demokratis, seperti melakukan pemilihan umum. Akan tetapi, penting dicatat bahwa konsesi

Assad terhadap revolusi juga bersifat ekonomi, seperti kenaikan upah, dan usaha "menyingkirkan" Mahlouf dari bisnis, dengan kekayaannya yang akan dipindahkan ke badan amal untuk rakyat.

Fakta-fakta ini menunjukkan sejauh mana tuntutan demokratis itu sendiri, di mata massa kelas pekerja miskin dan pekerja Suriah terkait dengan kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak. Rezim Assad juga menyadari hal ini. Itulah sebabnya pada saat ini massa memiliki ilusi yang signifikan dalam demokrasi borjuis, seperti yang terjadi di Mesir, Tunisia dan Libya juga. Mereka menyamakan demokrasi dengan keadilan sosial!

Gerakan tersebut dengan sangat jelas terus bergerak - meski ada serangan mengerikan di kota Homs dan daerah lainnya. Luasnya gerakan yang berkembang, yang menyebar ke Aleppo dan Damaskus, dan perkembangan dari Tentara pembebasan Suriah telah memperkuat tekad gerakan perlawanan.

Pembentukan dewan-dewan populer di mana orang-orang telah mampu membangun kontrol, untuk sementara mengganti rezim negara lama, juga merupakan perkembangan yang sangat signifikan. Sejauh ini, hal tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat dan terbatas di negara ini. Terlepas dari hal ini, usaha tersebut adalah gejala dari apa yang mungkin terjadi jika adanya kepemimpinan revolusioner massa sejati.

Namun, meski ketika memperdalam gerakan ini, ada kebingungan yang signifikan pada saat sekarang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan oposisi utama terdiri dari *Ikhwanul Muslimin* dan beberapa organisasi borjuis liberal. Mereka mengendalikan Dewan Nasional Suriah (SNC). Orang-orang ini yang menempatkan diri mereka maju sebagai apa yang disebut "pemimpin" revolusi terlibat dalam hubungan reguler dengan para kepala negara pemerintahan Barat.

"Kepemimpinan" ini telah memainkan peran yang sangat merusak dalam gerakan tersebut. Mereka belum mengajukan sebuah program nyata mengenai tuntutan ekonomi dan politik, dan sebagian besar mengabaikan masalah ekonomi yang karna hal itu lah yang membawa rakyat turun ke jalan. Hal Itu mencerminkan sikap asli borjuis

mereka sendiri. Banyak dari unsur-unsur ini juga memainkan permainan Assad untuk mengipasi perpecahan etnis dan sektarian, tapi dari sisi lain, dan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, SNC juga meminta intervensi asing di Suriah, dan telah mengkooptasi para pemimpin Tentara Pembebasan Suriah, yang sekarang telah keluar untuk mendukung "*no-fly zone*"

Masalahnya, bagaimanapun juga, bukan karena SNC tidak memiliki program politik. Masalahnya adalah sifat dari program itu sendiri. Program politiknya adalah demokrasi burjuis di bawah perlindungan AS. Ini adalah program reaksioner yang ditolak banyak pihak dalam kubu oposisi, karena ada ketidakpercayaan naluriah terhadap para ekstremis liberal yang didanai oleh AS di antara para pendukung Assad dan di antara banyak orang yang secara aktif terlibat dalam revolusi melawan Assad!

Oleh karena itu, program politik borjuis SNC, pandangan sektariannya yang sempit dan posisi pro-imperialisnya telah sangat melemahkan gerakan tersebut. Banyak lapisan masyarakat yang ingin menyebrang ke sisi revolusi menjadi ragu-ragu pada apa yang disebut kepemimpinan ini, yang telah mengasingkan bagian penting terpenting dalam masyarakat Suriah, dan mempermudah Assad untuk mempertahankan lapisan masyarakat yang mendukung dirinya.

Sederhananya, SNC tidak mengedepankan alternatif yang berarti. Kegagalan kepemimpinan telah membuat revolusi berjalan berlarut-larut dan massa telah membayar harga yang mahal untuk kelemahan ini. Memang, SNC menempatkan seluruh revolusi beresiko; Sebenarnya mereka mencoba mendorong gerakan massa menuju arah jalan kontra-revolusi.

Pengalaman Dewan Nasional Irak dan Chalabi adalah salah satu hal yang patut dipertimbangkan sehubungan dengan apa yang terjadi di Suriah. Dewan Nasional Irak adalah agen AS di Irak yang sekarang telah berakhir sebagai tawanan kaum fundamentalis al-Sadr. Kita tidak boleh lupa bahwa gerakan revolusioner pernah terjadi di Irak, Shoras di Utara dan pemberontakan kaum Syiah di Selatan, namun keduanya dilumpuhkan oleh kombinasi intervensi imperialis, represi Saddam Hussein dan manuver partai-partai

reaksioner Kurdis. dari Barzani hingga Talabani.

Ada juga elemen lain yang harus dipertimbangkan di sini, dan bahwa elite penguasa di Arab Saudi, dan khususnya di Qatar, juga memiliki agendanya sendiri di Suriah. Mereka memiliki ketertarikan untuk melihat akhir dari rezim Assad karena ini akan melemahkan pengaruh Iran. Baik Arab Saudi maupun Qatar telah memainkan peran penting di Libya dan Tunisia dalam mempromosikan agen lokal mereka di sana. Jelas bahwa mereka sudah mempersenjatai dan melatih agen mereka sendiri di dalam tubuh oposisi, bersiap menghadapi hari setelah Assad jatuh. Ini sebenarnya adalah apa yang banyak ditakuti banyak orang Suriah, bahwa revolusi akan menyebabkan kekuatan seperti *Ikhwanul Muslimin* datang ke permukaan di Suriah.

Ketakutan ini diperkuat oleh fakta bahwa Hamas sekarang telah menyerukan pembangkangan terhadap rezim Assad dan kemudian mendukung revolusi tersebut, menarik semua tokoh pentingnya dari Damaskus. Ini menunjukkan bahwa mereka juga berupaya mengalihkan revolusi ke garis-garis fundamentalis Islam, sesuatu yang akan melemahkan revolusi lebih jauh.

Meskipun situasinya sangat berbeda, ini mengingatkan pada Perang Saudara Spanyol, di mana revolusi —pemberontakan melawan Franco— diambil alih oleh elemen borjuis. Begitu ini terjadi, kandungan sosial revolusi telah dihapus, dan yang tersisa hanyalah dua kamp borjuis. Sebenarnya, dalam bukunya yang terkenal tentang Perang Saudara Spanyol, sejarawan Hugh Thomas memiliki satu bab berjudul "*Rising and Revolution*" namun sebuah bab selanjutnya di tulis yang berjudul "Perang Dua Kontra-Revolusi". Begitu perang menjadi semata-mata untuk membela demokrasi borjuis melawan fasisme, tanpa ada muatan sosial seperti tuntutan tanah yang harus diambil dari tuan tanah atau pabrik untuk dinasionalisasi, ia kehilangan kekuatannya untuk mengumpulkan massa sebagai satu kekuatan.

Di Suriah hari ini, ada juga kevakuman besar di dalam gerakan kiri. Gerakan komunis yang dulu kuat di Suriah telah sangat dilemahkan oleh kebijakan Stalinis yang mereka bawa. Seperti yang telah kita lihat, penjualan diri habis-habisan dari Partai Komunis Suriah, yang telah bertindak

sebagai pendukung setia rezim Assad dan sebagai bagian dari Front Progresif Nasionalnya, tercermin dalam posisi kontra-revolusioner mereka saat ini. .

Hal ini membuat tugas Marxis sejati menjadi lebih sulit, karena pertama-tama mereka harus menjelaskan mengapa beberapa "komunis" tidak menggabungkan dirinya kedalam revolusi, membedakan diri nya sendiri atas kaumnya sendiri dan kemudian menjelaskan posisi apa yang harus di ambil Marxisme sejati. Kaum Marxis adalah bagian dari gerakan revolusioner di Suriah dan telah berjuang berdampingan dengan rakyat Suriah. Pada saat bersamaan, kami dengan sabar menjelaskan peran jahat yang dimainkan oleh berbagai badan yang menganggap diri sebagai pucuk pimpinan atas gerakan tersebut, khususnya SNC. Kita harus mengemukakan perspektif revolusioner yang sejati, yang akan membantu membawa revolusi menuju kemenangan dan menyelesaikan kebutuhan mendesak para pekerja, petani, pemuda, dan pengangguran di Suriah.

Menentang intervensi asing!

Satu hal yang harus dinyatakan dengan jelas adalah bahwa kaum imperialis tidak dapat memainkan peran positif di Suriah. Kami mengutuk campur tangan imperialis dalam urusan Suriah. Di Timur Tengah, peran imperialisme telah sepenuhnya terpapar. Pendudukan brutal Irak dan Afghanistan yang telah membuat ratusan ribu warga sipil binasa, sementara tidak ada kemajuan apapun dalam hal standar hidup rakyat, reformasi demokratis, kesetaraan perempuan atau pertumbuhan ekonomi. Imperialisme telah meninggalkan warisan perang demi perang, korupsi dan konflik sektarian, sementara perusahaan besar telah menghasilkan keuntungan besar dari kekayaan minyak, rekontruksi dan manufaktur senjata.

Dalam perjuangan revolusioner di Tunisia, Mesir dan Bahrain, kaum imperialis secara terbuka mendukung rezim lama yang berkuasa dan memberi mereka bantuan militer. Amerika Serikat dan Kanada terus mengirimkan senjata dan gas air mata terhadap dewan militer Mesir Jenderal Tantawi. Demikian juga Arab Saudi terus menjadi penerima utama senjata dari Barat sementara mereka secara brutal menghancurkan revolusi di Bahrain.

Seperti yang telah diperiksa sebelumnya, rezim Suriah secara langsung terkait dengan Rusia dan Iran. Rezim ini juga merupakan mitra kerja imperialisme AS dan Israel. Harus dikatakan, bagaimanapun juga, bahwa pada saat ini, nampaknya imperialis Barat sangat ragu untuk campur tangan secara langsung di Suriah. Mereka membatasi aktivitas mereka untuk mengutuk rezim Suriah, dan mempromosikan antek-antek lokal mereka.

Pernyataan oleh Jenderal Dempsey yang mengecam Tentara Pembebasan Suriah adalah indikasi kecurigaan dimana imperialis Barat memandang revolusi. Negara barat akan terus melakukan manuver melawan revolusi melalui teman-teman mereka didalam Dewan Nasional Suriah (SNC).

Orang-orang Suriah harus dengan tegas mengutuk manuver-manuver yang di lakukan oleh kaum imperialis. Kepentingan kaum imperialis tidak dapat dipungkiri bertentangan dengan kepentingan para pekerja, petani dan pemuda di Timur Tengah. Kaum imperialis ingin menjarah sumber daya daerah dan menemukan pasar baru untuk produk mereka. Massa di wilayah tersebut harus meningkatkan perlawanan mereka atas penjarahan dan ketidaksetaraan kekayaan ini. Keyakinan dan kesadaran revolusioner yang dipicu oleh *Arab Springs* secara langsung mengancam kepentingan kaum imperialis. Kita seharusnya tidak memiliki ilusi dalam peran kontra-revolusioner yang mereka mainkan.

Kemana arah maju untuk Suriah?

"Pemimpin" resmi dari gerakan sosial di Suriah telah berhasil memusuhi sebagian besar populasi yang seharunya dapat digiring ke dalam kubu revolusi. Revolusi telah maju secara perlahan dengan perlahan karena bagian masyarakat yang secara obyektif seharusnya bersama revolusi belum berbaris di belakangnya. Faktanya adalah bahwa karena serangkaian faktor –di antaranya sifat borjuis SNC dan hubungannya dengan imperialisme– Assad masih mempertahankan tingkat dukungan, dan telah mampu menggunakan perpecahan etnis untuk kelangsungan kekuasaanya.

Semua ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang menentukan yang mampu mengemukakan program

konkret atas tuntutan politik dan ekonomi, baik yang bersifat demokratis maupun sosialis dan dengan demikian melampaui perpecahan sektarian. Justru dengan tidak adanya program semacam itu lah yang merupakan kelemahan terbesar dari revolusi Suriah.

Beberapa "pemimpin" sebenarnya mempresentasikan revolusi dalam istilah sektarian atau agama. Presentasi gerakan tersebut sebagai "Islam" membuat banyak minoritas etnis dan agama dari gerakan tersebut, dan juga bagian penting dari orang-orang Suriah sekuler dan progresif, terutama di Aleppo dan Damaskus berpaling dari gerakan revolusi. Perang kontra-revolusioner yang dilakukan rezim Assad bukanlah perang melawan Islam –ini adalah perang melawan rakyat Suriah– namun karena sifat dari pemimpin gerakan oposisi, perang tersebut terlihat demikian.

Memajukan tuntutan sosial dan ekonomi akan terbukti menentukan, dan akan memotong perpecahan antar etnis dan agama. Ini harus mencakup permintaan untuk re-nasionalisasi semua industri yang telah diprivatisasi oleh Assad, pembentukan kontrol demokratik pekerja di tempat kerja, pengambilalihan aset dan perusahaan dari kelompok Assad dan membangun kembali subsidi untuk barang-barang dasar. Kebutuhan mendesak untuk pekerjaan, perumahan dan layanan harus dijadikan prioritas revolusi.

"Pemimpin" yang menolak untuk mengajukan tuntutan ekonomi semacam itu karena kepentingan ekonomi pribadi mereka harus dihilangkan dan diganti oleh perwakilan sejati dari orang-orang revolusioner. Para pemimpin sekarang hanya akan menggunakan revolusi untuk memajukan, sambil mempertahankan semua struktur lama dan ketidaksetaraan yang utuh.

Orang-orang Suriah telah menunjukkan naluri revolusioner yang hebat. Contoh di mana mereka telah membentuk dewan populer untuk menggantikan aparatur negara lama dan mengkoordinasikan kehidupan sosial dan ekonomi di kota-kota tertentu menunjukkan jalannya. Pembentukan tentara revolusioner, dari jajaran tentara dan warga sipil bersenjata, merupakan langkah maju yang besar, namun jika tidak disertai program sosialis revolusioner, penyisiran revolusi tetap terbatas, dan

tidak dapat membawa keluar potensi penuh yang ada.

Kurangnya kepemimpinan revolusioner sejati gerakan ini akan menghasilkan perjuangan yang berlarut-larut yang bisa menjadi sangat berdarah-darah. Memang kejadian baru-baru ini di Homs dan daerah lainnya adalah konfirmasi dari fakta ini. Kepemimpinan saat ini terus-menerus menyerukan "kesatuan" dalam menghadapi kritik apapun. Sebenarnya, dengan alasan "persatuan", mereka berusaha menghancurkan pertentangan sejati dalam bentuk apa pun terhadap usaha mereka untuk mengambil alih dan memundurkan laju revolusi. Merekalah yang akan memecah gerakan melalui tindakan mereka.

Kepemimpinan yang tulus harus melampaui perpecahan sektarian, menentang semua intervensi asing dan memajukan tuntutan sosial dan ekonomi untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak rakyat. Kepemimpinan seperti itu, yang bisa menyatukan berbagai sisi gerakan rakyat, dapat memenangkan hati mayoritas massa pekerja yang diperlukan untuk bisa mengakhiri masa pemerintahan Assad yang brutal untuk selamanya, dan membentuk Suriah yang benar-benar demokratis dan sosialis.



Judul Asli:In Defence of the Syrian Revolution: The Marxist position on the revolution and Assad's so-called "anti-imperialism"

Sumber: marxist.com pada tanggal 15 dan 16 Maret 201

alih bahasa: wisnuprimason

Murray Bookchin dan Perlawanan Kaum Kurdi



oleh:Joris Leverink

Pengantar buku baru *The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy* (Verso, 2015), menjelaskan bagaimana Murray Bookchin —yang lahir dari imigran Yahudi-Rusia di New York City pada tahun 1921— diperkenalkan pada politik radikal di usia sembilan tahun saat bergabung dengan *Young Pioneers*, sebuah organisasi pemuda Komunis. Perkenalan ini akan menjadi awal dari 'kehidupan kiri' di mana dia akan beralih dari Stalinisme ke Trotskisme pada tahun-tahun ketika dunia sedang berjalan menuju Perang Dunia ke-dua sebelum mendefinisikan dirinya sebagai seorang anarkis di akhir 1950-an dan akhirnya mengidentifikasi sebagai 'komunalis' atau *'libertarian municipalist'* setelah berkenalan dengan gagasan ekologi sosial.

Meskipun Bookchin bahkan tidak pernah kuliah —kecuali beberapa kelas teknologi radio setelah Perang Dunia ke-dua— dia menulis lusinan buku dan menerbitkan ratusan artikel akademis, selain menerbitkan beberapa jurnal dan mendirikan *Institute for Social Ecology* pada tahun 1974. Mungkin Sumbangan terpentingnya bagi politik radikal adalah mengenalkan

konsep ekologi ke arena pemikiran politik.

Bookchin menentang gagasan dan praktik gerakan lingkungan yang muncul pada waktu itu, menuduh mereka hanya menganjurkan "perbaikan teknis" dari kapitalisme, berlawanan dengan pendekatan ekologis yang berusaha mengatasi akar permasalahan secara lebih sistemik. Dalam pandangannya, kerusakan fatal kapitalisme tidak terletak pada eksploitasi atas kelas pekerja, seperti yang diyakini oleh kaum Marxis, namun pada sistemnya yang konfliktual terhadap, lingkungan alam yang, jika dibiarkan berkembang tanpa hambatan, pasti akan mengarah pada dehumanisasi manusia dan penghancuran alam.

The Next Revolution mencakup esai dari tahun 1992 yang berjudul *The Ecological Crisis and the Need to Remake Society*. Di dalamnya, Bookchin berpendapat bahwa "pesan paling mendasar bahwa kemajuan ekologi sosial adalah bahwa gagasan untuk mendominasi alam berasal dari pendominasian manusia atas manusia." Agar masyarakat ekologis berkembang, pertama-tama dominasi antar manusia harus diberantas. Menurut Bookchin, "kapitalisme dan alter egonya, 'sosialisme negara,' telah membawa semua masalah dominasi sepanjang sejarah umat manusia" dan ekonomi pasar, jika tidak dihentikan, akan berhasil menghancurkan lingkungan alam kita sebagai sebuah hasil dari "hidup atau mati" nya ideologi.

Selama bertahun-tahun, Bookchin berusaha meyakinkan kelompok anarkis di AS bahwa idenya tentang munisipalis libertarian —yang, dengan kata-katanya sendiri "berusaha untuk merebut kembali ruang publik untuk pelaksanaan kepentingan ploitik warganya secara otentik sambil melepaskan diri dari siklus suram parlementerisme dan mistisisme dari mekanisme 'partai' sebagai sarana representasi kepentingan publik"— adalah kunci untuk membuat anarkisme menjadi relevan lagi secara politik dan sosial.

Munisipalis-Libertarian mempromosikan penggunaan majelis tatap muka langsung untuk "mencuri" praktik politik kembali dari para politisi profesional dan kariris dan menempatkannya kembali ke tangan warga negara. Bookchin Menggambarkan negara sebagai "formasi yang benar-benar asing" dan "duri di sisi

perkembangan umat manusia," Bookchin menyajikan munisipalis-libertarian sebagai "tatanan demokratis dan non-hierarkis dalam strukturnya," dan juga "didasarkan pada perjuangan untuk mencapai masyarakat yang rasional dan ekologis. "

Satu hal yang membuat frustrasi Bookchin adalah banyak kaum anarkis menolak untuk mengadopsi gagasannya, tidak mau menerima hal itu, agar tetap relevan secara politik dan dapat melakukan revolusi secara nyata, mereka harus berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Meskipun proses pendewasaan diri secara politis Bookchin banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Marxis, sindikalis dan anarkis, Bookchin segera mengembangkan dan mempertahankan kritik mendasar dari semua arus pemikiran ini, yang tidak hanya mengarah pada pengembangan gagasannya sendiri tentang ekologi sosial, namun juga meninggalkannya dengan banyak kritikan yang muncul dari orang-orang “kiri”.

Perlawanan Kaum Kurdis

Pada akhir 1970-an, ketika Bookchin sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas nilai dan pentingnya teori ekologi sosialnya di AS, sebuah perjuangan yang sama sekali berbeda muncul di sisi lain belahan dunia. Di wilayah pegunungan, yang didominasi suku Kurdi di tenggara Turki, sebuah organisasi yang pada akhirnya akan mengadopsi dan menyesuaikan ekologi sosial Bookchin di dirikan.

Organisasi yang menyebut dirinya Partai Pekerja Kurdistan, atau PKK, pada tahun 1984 meluncurkan serangan pertamanya terhadap negara Turki. Operasi pertama ini segera diikuti oleh serangan yang lainnya dan akhirnya berkembang menjadi sebuah perjuangan bersenjata selama tiga dasawarsa yang masih belum terselesaikan.

PKK terinspirasi oleh pemikiran Marxis-Leninis dan berjuang untuk sebuah negara Kurdi merdeka yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosialis. Tanah air tradisional Kurdi mencakup wilayah-wilayah yang mencakup Turki, Iran, Irak dan Suriah modern, namun diukir ulang pada awal abad ke-20, ketika sebuah kesepakatan terjadi mengenai pembagian wilayah bekas Ottoman-Turki di Timur-Tengah antara Prancis dan Inggris. Perbatasan antara Turki, Suriah dan Irak ditetapkan dalam kesepakatan

Sykes-Picot yang terkenal pada tahun 1916.

Meskipun keinginan utopia untuk suatu saat hari nanti dapat melihat berbagai wilayah Kurdi bersatu, perjuangan PKK berfokus terutama pada pembebasan Kurdistan bagian Utara, atau wilayah Bakur — wilayah Kurdi yang diduduki oleh negara Turki. Namun, selama tahun 1990an, PKK perlahan mulai menjauh dari keinginannya untuk membentuk sebuah negara merdeka yang mandiri dan mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang lain.

Pada tahun 1999, Abdullah Öcalan — pendiri dan pemimpin PKK— menjadi subyek perselisihan diplomatik antara Turki dan Suriah, tempat dimana dia mengarahkan operasi PKK setelah dipaksa untuk melarikan diri dari Turki dua dekade sebelumnya. Suriah menolak untuk menampung dan melindungi pemimpin pemberontak itu lebih lama lagi, membuat Ocalan hanya memiliki sedikit pilihan selain meninggalkan negara tersebut untuk mencari tempat berlindung lainnya. Tidak lama kemudian, dia ditangkap di Kenya dan diekstradisi ke Turki di mana dia dijatuhi hukuman mati — sebuah hukuman yang kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup.

Penangkapan Öcalan adalah titik tolak perjuangan kemerdekaan PKK. Tak lama kemudian, organisasi tersebut mencabut landasan perjuangannya untuk mendirikan sebuah negara merdeka dan mendukung tuntutan otonomi yang lebih banyak di tingkat lokal. Di penjara, Öcalan mulai membiasakan dirinya dengan karya-karya Bookchin, tulisan-tulisannya tentang transformasi sosial memengaruhinya untuk menyerahkan cita-citanya mengenai negara yang merdeka dan lebih memilih alternatif yang dia sebut *'Democratic Confederalism'*.

Beberapa tahun sebelumnya, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, PKK sudah mulai secara kritis merenungkan ulang konsep negara-bangsa. Tak satu pun dari kampung halaman tradisional orang Kurdi secara eksklusif di duduki oleh orang Kurdi. Sebuah negara yang didirikan dan dikendalikan oleh orang-orang Kurdi secara otomatis akan menjadi tuan rumah bagi kelompok minoritas dengan jumlah besar, menciptakan potensi penindasan etnis dan agama

minoritas dengan cara yang sama seperti yang telah di terima oleh orang-orang Kurdi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, sebuah negara Kurdi semakin terlihat sebagai kelanjutan dari, daripada sebuah solusi, masalah yang ada di kawasan ini.

Akhirnya, setelah menganalisis saling ketergantungan antara kapitalisme dan negara-bangsa di satu sisi, dan antara patriarki dan kekuasaan negara yang terpusat di sisi lain, Öcalan menyadari bahwa kemerdekaan dan kebebasan sejati hanya dapat terjadi begitu gerakan tersebut memisahkan semua ikatan dengan bentuk-bentuk yang telah melembagakan penindasan dan eksploitasi ini.

KONFEDERALISME DEMOKRATIS

Dalam pamfletnya di 2005, *Declaration of Democratic Confederalism*, Abdullah Öcalan secara formal dan definitif memutuskan hubungannya dengan aspirasi PKK sebelumnya tentang pendirian negara-bangsa Kurdi yang merdeka. "Sistem negara-bangsa," menurutnya dalam dokumen tersebut, "telah menjadi penghalang serius bagi perkembangan masyarakat, demokrasi dan kebebasan sejak akhir abad ke-20."

Dalam pandangan Öcalan, satu-satunya jalan keluar dari krisis yang berada di Timur-Tengah adalah pembentukan sistem konfederalis yang demokratis "yang akan memperoleh kekuatannya secara langsung dari masyarakat, dan bukannya dari globalisasi berdasarkan negara-negara." Menurut pemimpin pemberontak yang dipenjara tersebut, "Baik sistem kapitalis maupun tekanan dari kekuatan imperialis tidak akan mengarah pada demokrasi; kecuali untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Sehingga tugas kita adalah untuk membantu mengembangkan demokrasi berbasis akar rumput ... yang akan menaruh perhatian lebih besar kepada perbedaan agama, etnis dan kelas dalam masyarakat."

Segera setelah permintaan Öcalan untuk mengembangkan model konfederalis yang demokratik, *Democratic Society Congress* (DTK) didirikan di Diyarbakir. Dalam sebuah pertemuan di tahun 2011, badan sosial tersebut meluncurkan tuntutannya untuk sebuah otonomi yang demokratik di mana ia menuntut otonomi dari negara di bidang politik, keadilan, swa-pertahanan, budaya,

masyarakat, ekonomi, ekologi dan diplomasi. Reaksi negara Turki dapat diprediksi: mereka memilih untuk mengkonfrontasi dan melakukan kriminalisasi, lalu kemudian menjadikan DTK sebagai organisasi terlarang.

Bukan suatu kebetulan bahwa gagasan Konfederalisme Demokrat, seperti yang dikembangkan oleh Öcalan, menunjukkan banyak kesamaan dengan gagasan Bookchin mengenai ekologi sosial. Pada awal tahun 2000an, Öcalan mulai membaca *Ecology of Freedom and Urbanization Without Cities* ketika di penjara dan segera setelahnya mengumumkan bahwa dirinya sebagai murid Bookchin. Melalui pengacaranya, Öcalan berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan pemikir radikal tersebut untuk menemukan cara mengimplemtasikan gagasan Bookchin tersebut diterapkan sesuai dengan konteks dan kondisi di Timur-Tengah.

Sayangnya, karena kesehatan Bookchin yang buruk pada saat itu, pertemuan ini tidak pernah terjadi, namun dia mengirim sebuah pesan kepada Öcalan pada bulan Mei 2004: "Harapan saya adalah bahwa orang-orang Kurdi pada suatu saat dapat membangun masyarakat yang merdeka dan rasional yang akan memungkinkan kecemerlangan masyarakat kurdi untuk sekali lagi dapat berkembang. Mereka beruntung bisa memiliki pemimpin berbakat seperti tuan Öcalan untuk membimbing mereka. "

Sebagai gantinya, dan sebagai bentuk pengakuan akan pengaruh kritis Bookchin terhadap gerakan Kurdi, sebuah majelis PKK menghormatinya sebagai "salah satu ilmuwan sosial terbesar abad ke-20" ketika dia meninggal pada bulan Juli 2006. Mereka mengungkapkan harapan mereka bahwa orang Kurdi akan menjadi masyarakat pertama yang membangun konfederalisme demokratis, menyebut proyek itu proses "kreatif dan dapat direalisasikan."

Dual Power, Konfederalisme dan Ekologi Sosial

Selama satu dasawarsa kebelakang, konfederalisme yang demokratis perlahan tapi pasti menjadi bagian integral dalam masyarakat Kurdi. Tiga elemen pemikiran Bookchin telah sangat mempengaruhi perkembangan "modernitas demokrasi" di Kurdistan: konsep "*Dual Power*," struktur konfederasi seperti yang

diusulkan oleh Bookchin di bawah ide ide Munisipalis-Libertarian, dan teori ekologi sosial yang menelusuri banyak akar dari perjuangan kontemporer kembali menuju asal-usul peradaban dan menempatkan lingkungan alam sebagai jantung dari solusi untuk permasalahan ini.

Duel Power

Konsep *dual power* telah menjadi salah satu alasan utama mengapa kerangka pemikiran Bookchin ditolak oleh kelompok anarkis, komunis dan sindikalis. Alih-alih mengadvokasi penghapusan negara melalui pemberontakan kaum proletar, dia menyarankan agar mengembangkan institusi alternatif dalam bentuk majelis tinggi dan komite-komite kecil yang berada dilingkungan sekitar — dan terutama dengan mengambil bagian dalam pemilihan kota— kekuatan negara dapat "dilubangi" dari bawah, yang pada akhirnya akan membuatnya tidak berguna sama sekali.

Karakteristik Bookchin untuk mengambil alih dan membangun institusi kekuasaan berasal dari analisis politiknya yang bertentangan dengan tata kenegaraan (*statecraft*). Menurut Bookchin, "Marxis, sindikalis revolusioner, dan anarkis otentik semuanya memiliki pemahaman politik yang keliru, yang harus dipahami sebagai arena warga dan institusi dimana orang secara demokratis dan langsung mengelola urusan masyarakat mereka." Apa yang biasanya disebut sebagai "*Political*" dilihat Bookchin sebagai "*statecraft*", atau sejenis urusan para politisi profesional yang biasa mereka tangani.

"Politik" sebaliknya, diyakini hanya semacam praktik kejahatan yang inheren yang diyakini oleh banyak revolusioner sayap kiri perlu dihapuskan, yang sebenarnya adalah sebuah perekat yang mengikat masyarakat secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang perlu diatur sedemikian rupa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. "kemerdekaan dari otoritarianisme dapat diyakinkan hanya dengan pengalokasian kekuasaan yang jelas, ringkas, dan terperinci, bukan dengan pretensi bahwa kekuatan dan kepemimpinan adalah sebuah bentuk 'peraturan' atau metafora libertarian yang menyembunyikan realitas mereka," tulis Bookchin dalam esainya *The Communalist Project*.

Orang-orang Kurdi menyambut dengan baik tentang gagasan dualisme Bookchin yang sangat jelas dari mode organisasi DTK di dalam berbagai tingkat masyarakat. Rapat umum yang dilakukan DTK diselenggarakan dua kali dalam setahun di Diyarbakir, ibukota *de facto* Kurdistan Utara. Dari 1.000 delegasi, 40 persen dipilih sebagai pejabat yang menempati posisi yang berbeda-beda di dalam institusi pemerintah, sedangkan 60 persen sisanya berasal dari masyarakat sipil dan dapat menjadi anggota dari salah satu majelis tinggi, yang terdiri dari perwakilan LSM atau individu yang tidak berafiliasi pada apapun. Keputusan yang dibuat di majelis dipromosikan di dalam dewan kota oleh anggota yang menempati kursi di kedua badan organisasi tersebut.

Konfederalisme

Sistem konfederalis juga jelas termanifestasi dalam struktur organisasi DTK. Dalam *The Meaning of Confederalism*, Bookchin menggambarkan konfederalisme sebagai "jaringan dewan administratif yang anggotanya atau delegasinya dipilih dari majelis tatap muka yang demokratis, di berbagai desa, kota, dan bahkan di kota-kota besar." Penjelasan ini adalah yang hampir sempurna sesuai dengan situasi di lapangan di banyak tempat di wilayah Kurdi di Turki dan juga di Suriah utara.

Contoh yang jelas adalah situasi di Diyarbakir, dimana gerakan dewan telah sangat mapan. Dalam bukunya *Democratic Autonomy in North Kurdistan*, situasinya dijelaskan dengan sangat baik oleh anggota Dewan Kota Amed (Amed adalah nama Kurdi untuk Diyarbakir):

"Amed memiliki tiga belas distrik, dan masing-masing memiliki dewannya masing-masing. Di setiap distrik terdapat komunitas desa, yang memiliki dewan desa. Beberapa wilayah memiliki delapan dewan desa. Dan di beberapa tempat memiliki dewan bahkan di tingkat paling mikro yaitu lingkungan jalan. Di desa-desa terdekat, ada komune yang terkait langsung dengan dewan kota. Jadi, kekuasan politik diartikulasikan jauh lebih dalam kedalam basis yang terdalam."

Seperti Joost Jongerden dan Ahmet Akkaya tulis dalam *Confederalism and otonomy in Turkey*: "DTK bukan sekadar organisasi, tapi merupakan bagian dari upaya untuk membentuk sebuah paradigma

politik baru, yang didefinisikan oleh pelaksanaan langsung dan terus-menerus atas kekuatan rakyat melalui desa, kota dan dewan kota. "

Perlu dicatat bahwa paradigma politik baru ini tidak hanya diadvokasi oleh inisiatif yang ada di luar wilayah politik yang dilembagakan, tetapi juga oleh partai politik pro-Kurdi seperti *The Democratic Regions Party* (DBP) dan *The Peoples' Democratic Party* (HDP). Tujuan utamanya bukan untuk menetapkan Otonomi Demokrat secara eksklusif di wilayah Kurdi, tapi juga padatingkat nasional, baik di Turki maupun di Suriah.

Ekologi sosial

Teori ekologi sosial Bookchin ditandai oleh keyakinan bahwa "kita harus menyusun ulang hubungan sosial sehingga manusia dapat hidup dalam keseimbangan yang protektif dengan alam." Masyarakat pasca-kapitalis tidak dapat berhasil kecuali jika diciptakan selaras dengan lingkungan yang ekologis.

Bookchin berpendapat bahwa "pesan paling mendasar dari kemajuan ekologi sosial adalah bahwa gagasan untuk mendominasi alam berasal dari dominasi manusia atas manusia." Ekologi sosial bergerak melampaui pandangan Marxis dan anarkis tradisional tentang bagaimana mengatur masyarakt non-hierarkis, egaliter di tempatkan pada tempat yang sangat di butuhkan untuk mencegah bencana ekologis yang akan datang tepat ke tengah jantung perjuangan sosial kontemporer.

Bagi kaum Kurdi, secara tradisional warga pedesaan yang hidup di bidang pertanian dan peternakan, menjaga lingkungan ekologi sama pentingnya dengan menciptakan masyarakat egaliter. Penghancuran lingkungan yang dikendalikan oleh negara di daerah pegunungan mereka dan dataran subur Mesopotamika yang subur terjadi setiap hari.

Contoh yang paling jelas adalah proyek GAP di Turki, di mana puluhan bendungan raksasa telah dibangun atau sedang dibangun. Proyek ini gambarkan dapat membawa pembangunan bagi daerah dalam bentuk kesempatan bekerja di lokasi konstruksi, mega-pertanian irigasi yang lebih baik menghasilkan tanaman untuk di ekspor keluar negeri, dan menyediakan pekerjaan sehari-hari bagi petani kecil lahan

garapannya terampas oleh proyek besar ini dan peningkatan infrastruktur energi dengan pembangunan beberapa pembangkit listrik tenaga air.

Apa yang dianggap sebagai "pembangunan" oleh agen-agen pemerintah dialami secara sama sekali berbeda oleh orang-orang yang merasakan rumah dan desanya dibanjir oleh dampak dari pembangunan bendungan tersebut, sungai yang dulunya mengalir bebas berubah menjadi komoditas, tanah mereka diambil alih dan dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar dan digunakan untuk produksi barang skala industri yang tidak memiliki tujuan selain memperkaya pemilik peternakan di vila-vila mereka yang berada jauh dari tempat ini. Proyek mega dan sangat merusak ini mengekspos akan kebutuhan yang paling mendesak akan kontrol di tingkat lokal terhadap lingkungan setempat.

Tapi meskipun pergulatan untuk merebut lingkungan hidup dari cengkeraman destruktif kapitalis memerlukan konfrontasi langsung dari negara, langkah pertama yang penting — dan berpotensi lebih revolusioner— adalah melibatkan penghapusan hierarki pada tingkat interpersonal. Karena, seperti yang dikatakan oleh Bookchin, dominasi manusia atas alam berasal dari dominasi satu manusia di atas yang lainnya, solusinya harus mengikuti lintasan yang serupa.

Dalam hal ini, emansipasi wanita adalah salah satu aspek terpenting dalam ekologi sosial. Selama dominasi pria atas wanita tetap utuh, perlakuan terhadap lingkungan alam kita sebagai bagian penting dan integral dari kehidupan manusia — dan bukan komoditas yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan kita— berjarak masih jauh.

Dalam hal ini, proyek emansipatoris yang sedang berlangsung di masyarakat Kurdi merupakan tanda bahwa harapan tersebut masih ada. Meskipun dalam banyak kasus hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat Kurdi masih dipandu oleh kebiasaan dan tradisi tua, perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat sudah dapat diamati. Sebagai salah satu aktivis Akademi Wanita kota Amed disebuah wawancara dengan Tatort Kurdistan:

“Keluarga Kurdi masih belum benar-benar terbuka terhadap sistem baru, seperti Otonomi

Demokratik. Mereka belum menginternalisasi hal itu. Kami, para aktivis, telah menginternalisasinya dan merupakan tanggung jawab kami untuk melakukan perubahan, untuk menyampaikan gagasan Otonomi Demokrat kepada keluarga di sini, bahkan jika itu hanya dalam langkah kecil. Kita bisa mulai membicarakannya di dalam rumah seperti yang kita lakukan di luar. Ketika keluarga kita melihat betapa seriusnya kita melakukan hal tersebut, hal itu akan mempengaruhi mereka. Tentu saja mendiskusikan hal tersebut seringkali sangatlah sulit, banyak pintu yang tertutup, orang-orang berteriak. Tapi ketekunan dan diskusi yang dilakukan secara terus-menerus mulai menciptakan perubahan didalam kehidupan keluarga."

Dengar, Pelajari dan Ikuti

Perkembangan terkini di Kurdistan –dan terutama di Rojava, wilayah Kurdi di Suriah utara– telah menggelitik imajinasi radikal para aktivis di seluruh dunia. Revolusi di Rojava telah dibandingkan dengan Barcelona pada tahun 1936 dan Zapatista di Chiapas, Meksiko. Kaum kiri yang radikal membutuhkan mitologinya tersendiri sama seperti orang lain, dan dalam pengertian ini Rojava, Barcelona dan Chiapas berfungsi sebagai pengingat penuh harapan bahwa sebuah alternatif yang lain itu ada; bahwa adalah mungkin untuk mengatur masyarakat dengan cara yang berbeda.

Namun, dengan hanya menempatkan contoh-contoh organisasi radikal ini di atas tumpuan, sebagai suar harapan untuk dipuja pada saat masa-masa sulit, dukungan kita untuk perjuangan ini seringkali tidak terlalu berbeda dengan dukungan yang kita berikan saat kita mendukung tim sepak bola favorit kita di layar TV. Zapatista berada di hutan Chiapas dan Kurdi di dataran Mesopotamia telah menempuh perjalanan jauh dengan tidak mengandalkan apa pun kecuali kekuatan dan tekad mereka sendiri. Isolasi terhadap mereka memungkinkan mereka dapat mengembangkan gagasan alternatif radikal mereka, namun jika ekperimen ini ingin bertahan dalam jangka yang panjang membutuhkan lebih dari sekadar pendukung dan simpatisan. Mereka butuh partner.

"Kapital global, justru karena ukuranya yang sangat besar, hanya dapat di gerogoti pada akarnya," tulis Bookchin dalam *A Politics for the Twenty-First*

Century, "secara khusus dengan resistensi kaum Munisipalis-libertarian yang berada di basis masyarakat. mereka harus bisa mengkikis akar ini oleh jutaan orang yang dimobilisasi oleh gerakan akar rumput, menantang kedaulatan kapital global atas kehidupan mereka dan mencoba mengembangkan alternatif ekonomi lokal dan regional untuk operasi industrinya. "

Bookchin percaya bahwa jika cita-cita kita adalah Komune dari Komune, tempat alami untuk memulainya adalah pada tingkat politik lokal, dengan sebuah gerakan dan program sebagai "advokasi tanpa kompromi dewan dan majelis kota serta mengembangkan ekonomi kota."

Pada akhirnya, cara terbaik untuk mendukung perjuangan kaum Kurdi, Zapatista dan banyak gerakan revolusioner lainnya beserta inisiatif lainya yang telah bermunculan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, adalah dengan mendengarkan cerita mereka, belajar dari pengalaman mereka dan mengikuti langkah kaki mereka.

Sebuah konfederasi kota yang mengatur dirinya sendiri, melampaui batas-batas nasional dan batas-batas etnis dan agama adalah benteng terbaik melawan kekuatan imperialis dan kekuatan kapitalis. Dalam perjuangan untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa contoh buruk yang selalu diikuti daripada gagasan yang telah ditetapkan oleh Murray Bookchin dan praktik Munisipalis- libertariannya.



judul asli: Murray Bookchin and The Kurdish Resistance
pertama kali terbit di: RoarMagazine.com
pada tanggal agustus 9 2015
pengalih bahasa:wisnuprimason


SOCIALISM WILL WIN
BEIR BUA

Otonomi di Timur-tengah



oleh:Sardar Saadi

Dengan bangkitnya kelompok jihadis di Timur-Tengah, saya merasa terganggu dengan pertanyaan bagaimana politik "pemberontakan" di wilayah ini telah bergeser begitu dramatis dari kecenderungan kiri sekuler yang digunakan untuk menantang Islam politik dan peraturan Islam di bidang kehidupan sosial menuju kepada dengan kecenderungan Islamis ekstremis yang menemukan masyarakat idealnya pada masa Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu. Hal ini terjadi bukannya karena sebuah alternatif sudah tidak tersisa atau tidak hadir lagi, tapi rakyat di Timur-Tengah tidak bisa mengabaikan lagi betapa terpinggirkannya mereka secara politik dan ekonomi.

Tidak lama sebelumnya, ada banyak gerakan radikal dan gerakan kiri tersebar di seluruh kawasan ini. Dari Kabul ke Palestina, kelompok mahasiswa radikal, organisasi feminis, kelompok pembebasan nasional dan perjuangan anti-kolonial, gerakan buruh dan tani, serta intelektual kiri adalah mereka yang berada di garis depan dalam perjuangannya melawan rezim yang otoriter, kepercayaan agama yang regresif, dan dominasi kekuatan imperialis di kawasan ini. Dimana mereka sekarang? Apa yang membuat kelompok jihadis hari ini sebagai orang-orang yang telah mengubah peta geopolitik di kawasan ini? mengapa politik generasi muda mulai berbalik dari yang



dahulunya digunakan untuk mengkritik Islam yang justru hari ini telah mempromosikan pembacaannya yang paling ekstrem?

Itu adalah beberapa pertanyaan untuk kita semua dari kawasan yang menginginkan masa depan yang lebih baik. Namun, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki akar yang jauh lebih dalam dan mengakar jauh kedalam akar sejarah kolonialisme dan imperialisme di kawasan ini juga. Tanpa diragukan lagi, orang-orang di Barat yang dengan senang hati mengikuti liputan media arus utama tentang Negara Islam (yang umumnya dikenal dengan singkatan akronim ISIS) yang brutal terhadap kota-kota besar di Irak dan Suriah tidak perlu repot-repot melihat bagaimana peran pemerintah mereka terhadap masalah ini. Belum lagi bagaimana kemudian media mainstream telah dengan baik menggambarkan orang-orang di kawasan ini sebagai fanatik yang terbagi dalam kelompok agama dan etnis sektarian yang tidak dapat hidup berdampingan secara bersamaan dan tidak dapat menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Satu Abad Penuh Penindasan dan Dominasi

Dengan melirik sejarah kontemporer Timur-Tengah, seseorang dapat mencari penyebab utama dibalik

bangkitnya kelompok-kelompok ini yang tersembunyi dalam politik kekuatan kolonial di kawasan ini sejak awal abad ke-20 sampai sekarang. Pada tahun 1916 sebuah kesepakatan rahasia *Sykes-Picot* yang membagi wilayah Kekaisaran Ottoman menjadi negara-negara bangsa buatan menandai dimulainya satu abad dominasi oleh kaum kolonialisme yang diikuti oleh pemerintah yang korup di tangan para penguasa minyak dan dikendalikan serta didukung oleh kekuatan imperialisme.

Sistem kontrol melalui rezim otoriter ini semakin intensif selama Perang Dingin untuk mencegah pengaruh Uni Soviet di kawasan ini. Akibatnya, sebuah "perang salib" ditabuh oleh rezim-rezim yang berkuasa terhadap orang-orang kiri. Gelombang penindasan, penangkapan dan pembantaian aktivis dan intelektual kiri yang tersebar di seluruh kawasan — terutama selama tahun 1970an dan 1980an— memiliki efek tak terhindar terhadap dinamika dan pergerakan sosial di kawasan ini.

Organisasi sayap kiri ditutup dan puluhan ribu anggota partai kiri, serikat pekerja, dan gerakan mahasiswa terbunuh pada tahun 1980an di penjara Iran, Turki, Irak, Suriah, Mesir, dan negara-negara lain di wilayah tersebut. Banyak lagi yang dijatuhi hukuman penjara jangka panjang, dan banyak dari mereka yang tinggal di luar penjara harus meninggalkan tanah air mereka sendiri dan pergi ke pengasingan untuk mencari keselamatan bagi diri mereka dan keluarga mereka. Pada saat inilah kelompok jihadis mulai bangkit karena dukungan utama yang mereka dapatkan dari kekuatan Barat dalam peran organisasi proxy untuk menghapus semua jejak politik kiri di kawasan tersebut.

Mujahidin di Afghanistan hanyalah salah satu dari banyak contoh dari praktik ini. Kelompok-kelompok ini memberikan bantuan ekstra untuk membungkam gagasan kiri, setelah itu mereka mulai tumbuh seperti sel kanker di setiap sudut wilayah ini. Selain itu, dalam dekade terakhir, kelompok-kelompok ini — terutama setelah pendudukan Afghanistan dan Irak— telah mendapatkan sebuah legitimasi di antara rakyat sebagai orang-orang yang memerangi "penjajah asing" dan "orang-orang kafir".

Meskipun ada perlawanan nyata terhadap pendudukan AS atas Irak dan Afghanistan, dari

perspektif kekuatan Barat mereka masih merupakan pilihan terbaik dalam mengendalikan kawasan tersebut dengan biaya yang jauh lebih minimal. Bersamaan dengan itu, kawasan ini telah berubah menjadi ladang pembunuhan dimana ekstrimis Islam dapat berjuang tanpa menimbulkan masalah bagi negara-negara Barat. Banyak laporan menyebutkan pejuang Islam asing berada diantara jajaran ISIS.

NEOLIBERAL ISLAM

Kelompok Islam ekstrimis hanyalah salah satu komponen politik dalam mempromosikan Islam sebagai musuh alami orang-orang kiri. Sejak gelombang perang imperialis di wilayah tersebut setelah 9/11, sebuah agenda baru muncul untuk mempromosikan Islam yang lebih "moderat" sesuai dengan ekonomi neoliberal global. Pilar utama dari agenda ini adalah pemerintah AKP di Turki. Partai AKP (*Justice and Development Party*) dianggap sebagai versi ideal sebuah negara Islam moderat dengan kebijakan ekonomi neoliberal yang dapat mempertemukan kemarahan rakyat melawan Barat sambil menanggapi keprihatinan agama mereka sendiri, dan bekerja sebagai agen kapital global di wilayah.

Pemerintah Turki, setelah disambut sebagai model terbaik untuk masa depan Timur-Tengah, memperoleh lebih banyak kekuatan dan keyakinan akan klaim mereka sebagai pemeran utama dalam komunitas Islam-sunni dunia. Namun, peran utama Turki hanyalah membawa lebih banyak kehancuran dan kekerasan sektarian antara Syiah dan Sunni. Dukungan sembrono dari pemerintah AKP, bersama dengan pemerintah negara-negara Teluk, terhadap kelompok jihad yang berperang melawan rezim Assad telah membuat Suriah terjerumus ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sejak awal perang saudara di Suriah, pemerintah Turki telah memainkan peran kunci dalam memperburuk situasi dengan mengubah Turki, dan terutama provinsi selatan negara itu yang berbatasan dengan Suriah, menjadi lokasi transit bagi kaum Islamis ekstrim dari seluruh dunia dalam perjalanan mereka ke Suriah. Selain menyediakan tempat yang aman bagi para jihadis, ada dugaan bahwa Turki juga telah menyediakan dukungan logistik dan militer terhadap kelompok jihadis.

ISIS dan Front *Al-Nusra* adalah dua kelompok jihadis utama yang mendapat keuntungan dari dukungan ini. Melihat situasi saat ini, satu-satunya cara agenda Islam "moderat" bisa berhasil adalah melanjutkan penindasan dan pengucilan terhadap oposisi sekuler dan kiri. Tindakan keras terhadap pemberontakan Gezi pada musim panas lalu, yang entah bagaimana dapat merepresentasikan kekecewaan orang-orang di Turki dengan agenda neoliberal pemerintah mereka, adalah contoh serius dari hal ini.

Ada sedikit keraguan bahwa kelompok jihadis adalah ancaman langsung bagi kawasan tersebut. Bukan hanya karena mereka telah menghancurkan semua jejak peradaban; Yang lebih mengerikan adalah peran mereka dalam meremehkan nilai-nilai kehidupan, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakang mereka kemanapun mereka pergi. Pertanyaan tentang "apa yang harus dilakukan" untuk menghentikan serangan gencar ini bukan lagi berharap bahwa mungkin di masa depan kondisi yang lebih baik akan terjadi – hal ini harus mendapatkan tanggapan secepatnya.

Namun, dilihat dalam konteks yang lebih luas, jelas bahwa kelompok-kelompok ini adalah salah satu bagian dari masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap alternatif untuk situasi saat ini harus bisa bertransformatif bagi semua orang yang menderita oleh tidak hanya oleh tangan kelompok jihadis, tetapi juga oleh tindak kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh rezim otoriter dan pemerintahan imperialis di kawasan tersebut.

Otonomi Kurdi dI Suriah Sebuah Alternatif ?

Bangsa Kurdi dikenal sebagai bangsa terbesar di dunia tanpa negaranya sendiri. Sejarah suku Kurdi sering dikaitkan dengan pemberontakan yang tak terhitung jumlahnya dalam menghadapi penindasan sistematis oleh negara-negara yang menjajah tanah mereka. Sejak terbentuknya negara-bangsa setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman oleh penjajah Inggris dan Prancis, Kurdistan telah terbagi antara empat negara: Iran, Irak, Suriah dan Turki. Kurdi adalah korban pertama dari kesepakatan yang dilakukan oleh kolonialisme.

Perjanjian *Sykes-Picot* pada tahun 1916 mengabaikan hak bangsa Kurdi untuk menguasai tanah mereka sendiri. Hal ini

menyebabkan terjadinya pembantaian, penindasan, dan asimilasi selama puluhan tahun. Bahasa Kurdi dilarang, hak mereka ditolak, dan mereka mengungsi dari tanah leluhur mereka. Perbatasan buatan yang disepakati dalam perjanjian *Sykes-Picot* dan dalam Perjanjian *Lausanne* 1923 yang memperbaiki perbatasan Turki terus menghantui orang-orang Kurdi yang tinggal di sekitar negara tersebut.

Orang-orang yang membutuhkan makanan dan obat-obatan di wilayah Kurdi di Suriah tidak dapat memperoleh bantuan dari keluarga mereka yang tinggal di sisi lain perbatasan. Sementara sebagian besar senjata dan peralatan militer telah dikirim ke pemberontak Suriah melalui Turki, perbatasan antara dua wilayah Kurdi telah ditutup, dan banyak pos militer baru telah didirikan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Suriah saat ini menyaksikan manifestasi paling mengerikan dari kebijakan historis *Divide and Rule* di Timur-Tengah ini. Situasi sosiopolitik di Suriah tidak menyisakan satu ruang pun untuk sebuah imajinasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang-orang kiri untuk mencari alternatif dan memperkuat Front persatuan. Dengan keyakinan bahwa di tempat yang paling tak terduga, alternatif yang paling realistis dapat muncul, wilayah Rojava di Suriah (dengan Rojava yang berarti "Barat", seperti di Barat Kurdistan - sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah Kurdi di Suriah) dapat mengajukan sebuah alternatif untuk masa depan kawasan ini.

Bangsa Kurdi di Suriah telah menunjukkan kemampuan dan kemauan mereka untuk menjadi suara alternatif di tengah kekacauan di wilayah tersebut. Sejak konflik Suriah meningkat dan berubah menjadi perang sipil, gerakan Kurdi yang dipimpin oleh PYD (*Democratic Union Party*) di Suriah telah menguasai sebagian besar wilayah Kurdi di negara ini. Pada bulan November 2013, PYD mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan semua persiapan untuk mengumumkan otonomi, dan sebuah konstitusi yang disebut Piagam Kontrak Sosial telah diusulkan.

Revolusi rakyat di Rojava mengakibatkan pembangunan sebuah daerah otonom terbagi menjadi tiga kanton otonom masing-masing dengan otonomi mandiri yang otonom. Kanton Cizre (Al-Jazeera) menyatakan otonomi nya pada tanggal 21

Januari, diikuti oleh kanton Kobane pada tanggal 27 Januari dan Kanton Efrin pada tanggal 29 Januari.

PYD bersikeras membentuk sebuah alternatif untuk semua dan tidak mengejar tuntutan dan kepentingan kelompok terhadap etnis manapun. Pada saat yang sama, mereka menolak untuk menjadi bagian dari perang sipil di Suriah dan menyatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan kekuatan militer mereka untuk membela diri dari serangan yang datang baik dari rezim Assad atau kelompok pendukung yang didukung oleh NATO, termasuk kelompok-kelompok jihadis seperti ISIS dan *Front Al-Nusra*. Namun, ketiga kanton ini berada di bawah serangan besar-besaran oleh ISIS.

Saat ini, ISIS telah memfokuskan serangannya ke kanton Kobane di mana pasukan pertahanan Kurdi YPG (Unit Pertahanan Rakyat) berjuang melawan serang ISIS yang sangat menentukan dalam tindakan perlawanan yang bersejarah.

Similaritas Interkontinental

Apakah Rojava menjadi Chiapas di Timur-Tengah? Inilah pertanyaan yang saya tanyakan setiap kali saya mendengar lebih banyak cerita yang berasal dari daerah kecil yang hanya merupakan satu kilasan harapan kecil di tengah kekacauan ini. Meskipun secara akademis orang Kurdi tidak dapat dianggap sebagai "kelompok masyarakat adat", status dan situasi politik mereka di Timur-Tengah dapat dibandingkan dengan beberapa populasi pribumi asli di Amerika Latin.

Meskipun ada beberapa perbedaan politik antara Tentara Pembebasan Nasional Zapatista di Chiapas dan gerakan Kurdi yang dipimpin oleh PYD di Suriah, ada banyak kesamaan antara keduanya dalam hal posisi mereka baik dalam urusan regional maupun internasional. Upaya menciptakan pemerintahan yang otonom, bangkitnya majelis rakyat, perjuangan yang menekankan pada kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan di setiap tingkat kehidupan sosial dan politik, ideologi anti-imperialis dan anti-otoriter, penekanan terhadap pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup, pertahanan diri, dan banyak aspek lainnya menunjukkan bagaimana revolusi Rojava menyerupai perlawanan Zapatista di Meksiko Selatan.

Piagam Kontrak Sosial, sebagai dasar otonom di kanton Rojava, merupakan terobosan bersejarah di kawasan ini dalam hal prinsip-prinsip demokrasi yang membimbing kehidupan sosial dan politik. Piagam, yang saat ini dilaksanakan di ketiga kanton otonom, muncul sebagai kesepakatan demokratis - termasuk semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan Rojava. Tanpa berlebihan, konstitusi paling demokratis yang dimiliki orang-orang di kawasan ini.

Paragraf pertama dari kata pengantar Piagam mengatakan,

"Kami masyarakat daerah otonom mandiri; bangsa Kurdi, Arab, Asyur (Asiria Kasdim, Aram), Turkmen, Armenia, dan Chechnya, dengan kehendak bebas kami, mengumumkan hal ini untuk memastikan keadilan, kebebasan, demokrasi, dan hak perempuan dan anak sesuai dengan prinsip keseimbangan ekologis, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kesetaraan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kepercayaan, doktrin atau gender, untuk mencapai struktur politik dan moral masyarakat demokratis agar dapat berfungsi dengan saling pengertian dan koeksistensi dalam keragaman dan penghormatan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri dan pembelaan diri bangsa. "

Selanjutnya:

"Daerah otonomi pemerintahan mandiri demokratis tidak mengakui konsep negara bangsa dan negara yang berdasarkan dasar kekuatan militer, agama, dan sentralisme" (terjemahan piagam dilakukan oleh penulis).

Gerakan Masyarakat Demokratis, atau TEV-Dem seperti yang dikenal di Kurdi, bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa diragukan lagi, mereka belum bisa mencapai masyarakat ideal, dan gerakan tersebut mengakui bahwa pihaknya masih dalam proses konstruksi. Dengan mengingat bahwa wilayah Rojava berada di bawah isolasi yang kejam oleh semua pihak, terutama pemerintah Suriah dan Turki, kelompok pemberontak Suriah, dan Pemerintah Daerah Kurdistan Barat di Irak. Media Barat, termasuk media independen dan alternatif, telah mengabaikan apa yang telah menghambat kemajuan dari usaha demokratik di Rojava atau bahkan sebaliknya gagal memperhatikannya. Bangsa

Kurdi belum menerima solidaritas dan dukungan yang layak mereka dapatkan.

Ertugrul Korkcu, seorang anggota parlemen Turki dari partai HDP Kurdi sayap kiri (Partai Demokrasi Rakyat), baru-baru ini mengatakan bahwa bangsa Kurdi memainkan peran seperti bangsa Rusia di Eropa setelah Perang Dunia I. Secara politis, bangsa Kurdi bukan sebuah kelompok yang homogen, namun ada beberapa kebenaran dalam pernyataan Kurkcu karena situasi di Timur-Tengah membangkitkan citra Eropa pada awal abad ke-20. Lebih tepatnya, kelompok jihad telah menjadi alat di tangan kekuatan kolonial dan rezim otoriter untuk membangun dan memperkuat hegemoni mereka di kawasan tersebut.

Rojava bisa menjadi alternatif karena menunjukkan bentuk pemerintahan otonom mandiri yang secara fundamental menantang ritual penindasan yang di praktik oleh komunitas religius dan mengusulkan pola kerja ko-eksistensi dengan semua budaya dan kepercayaan di daerah tersebut, tanpa melanggar hak-hak seseorang. Pengalaman Rojava dalam otonomi dapat menjadi model bagi konfederalisme demokratis di Timur -Tengah, di mana setiap komunitas memiliki hak untu menentukan nasib sendiri dan memerintah dirinya sendiri. Selain itu, hal ini adalah percobaan yang sangat progresif, karena wanita merupakan mesin perubahan yang sangat vital. Hevi Ibrahim, ketua kanton otonom Afrin, hanyalah satu contoh bintang yang bersinar.

Alternatif Rojava tidaklah imajinatif atau utopis. Alternatif ini telah membuktikan kelangsungan hidupnya melalui solusi praktis dan realisasi sehari-hari dari gagasan yang disajikan dalam Piagam Kontrak Sosial. Sebenarnya, Rajova menegaskan dirinya sebagai alternatif demokratis yang paling realistis di tempat yang paling tak terduga. Mengekspresikan solidaritas terhadap revolusi Rojava merupakan tugas yang mendesak bagi setiap orang yang peduli dengan masa depan di Timur-Tengah.

judul asli:Autonomy in Middle-East
pertama kali terbit di: Roarmagazine.com
pada tanggal 25 July 2014
pengalih bahasa: wisnuprimason





Konfederalisme dan Otonomi di Turki: Partai Pekerja Kurdistan dan Penemuan Ulang Demokrasi [1]

Oleh: Ahmet Hamdi Akkaya dan Josst Jongerden



Pengantar

Setelah periode panjang 'perjuangan pembebasan nasional' yang bertujuan untuk membangun sebuah negara merdeka, gerakan Kurdi di Turki yang dipimpin oleh Partai Pekerja Kurdistan (*Partiya Karkerên Kurdistan, PKK*), telah merubah arah dan menetapkan tujuannya untuk sebuah proyek demokrasi radikal.

Sama seperti halnya negara Turki yang tidak berhasil menghancurkan identitas bangsa Kurdi dan aspirasi politiknya selama berpuluh-puluh tahun Karena praktik asimilasi dan penindasan, maka PKK belum dapat menggulingkan sistem kontrol negara melalui perang gerilya yang berkepanjangan. Dalam manifestonya di tahun 1978, PKK telah menyerukan penghancuran semua bentuk kolonialisme dan pembangunan sebuah Persatuan Kurdistan. Namun, saat ini, tokoh terkemuka di PKK berpendapat bahwa kaum sosialis seharusnya tidak terlalu banyak memusatkan perhatiannya pada pembuatan sebuah negara seperti halnya pada proyek politik mereka terdahulu. Dengan kata lain, di samping pengakuan akan keterbatasan penggunaan kekerasan dalam perjuangannya, telah terjadi sebuah perubahan besar dalam filosofis organisasi tersebut.[2] Dengan membalikan tesis Lenin bahwa 'salah jika menafsirkan hak untuk penentuan nasib sendiri sebagai sesuatu yang berarti selain hak untuk eksis sebagai negara yang terpisah '(Lenin 1914), PKK menyatakan, pada dasarnya, adalah salah untuk menafsirkan hak penentuan nasib sendiri sebagai sesuatu yang tidak memiliki arti lain selain sebagai hak untuk eksis sebagai negara yang terpisah. Ini adalah pandangan yang sangat menegaskan, terlebih lagi, dalam analisis historis negara modern sebagai proyek borjuis (Karasu 2009).

Meskipun formasi ideologis PKK pada 1970-an tidak jauh berbeda dengan gerakan pembebasan lainnya pada periode tersebut, PKK mencoba untuk mengembangkan pemahamannya sendiri tentang sosialisme bahkan selama periode pembentukannya, terlepas dari doktrin komunis konvensional yang diimpor dari Uni Soviet atau Cina. Setelah penangkapan Abdullah Öcalan pada tahun 1999, pemimpinnya sekarang dipenjara, organisasi tersebut membuat sebuah langkah mundur menuju sebuah proyek demokrasi radikal, menolak tidak hanya apa yang dia sebut 'garis-garis nasional Kurdi klasik', tapi juga 'penafsiran Kaum kiri tentang tendensi yang sama '(Öcalan 1999: 10).[3] Dalam' teks pembelaan 'berikutnya, diajukan ke pengadilan Athena dan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Eropa (*ECtHR*), Öcalan mengubah pertimbangan teoretisnya menjadi konsepsi tentang apa yang dia sebut sebgai 'demokrasi radikal'.

Ide demokrasi radikal ini —

— radikal dalam arti bahwa ia mencoba mengembangkan konsep demokrasi melampaui bangsa dan negara—dikembangkan dalam tiga proyek:

Satu untuk sebuah republik demokratis (Turki), satu untuk Konfederalisme demokratik, dan satu untuk otonomi demokratik. Proyek untuk sebuah republik demokratik dipahami sebagai sebuah reformasi Republik Turki, melepaskan kewarganegaraan terpisah dari nasionalisme. Gagasan tentang Konfederalisme demokratis — dikembangkan, seperti halnya otonomi demokratis, dalam teks pembelaan nya— didefinisikan sebagai model untuk 'pemerintahan mandiri *(self-government*) demokratik' (Öcalan 2008: 32). Karena nya hal ini, seperti yang di usulkannya, harus dibangun di seluruh Kurdistan (dan di manapun orang Kurdi tinggal), Konfederalisme demokratik harus dianggap sebagai mekanisme utama penyatuan bangsa Kurdi dan Kurdistan. Gerakan pembebasan Kurdi, menurut Öcalan, harus bekerja untuk pembentukan sistem pengorganisasian-diri (*self-organisation*) semacam itu. Konfederasi demokratik adalah kembaran dari sistem otonomi demokratik, mengacu pada hak masyarakat untuk menentukan urusan ekonomi, budaya, dan sosial mereka sendiri. Sementara republik demokratik adalah proyek reformasi negara, proyek konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik adalah perwujudan gagasan tentang politik yang melampaui dan tanpa negara (Akkaya dan Jongerden 2011).

Pada artikel ini kami memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengeksplorasi bagaimana PKK memahami proyek konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik. Ini menjanjikan untuk memajukan pemahaman kita tentang PKK pada khususnya, dan berkontribusi pada politik radikal pada umumnya. Kedua, silsilah Konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik membawa perhatian kita pada karya Murray Bookchin, yang mempengaruhi Abdullah Öcalan.[4]

Pemikiran radikal Bookchin menyebut ideologinya sebagai 'komunalisme' dan 'munisipalis-libertarian'. bertujuan untuk menciptakan sebuah struktur demokrasi lokal seperti 'majelis pertemuan antar komunitas, pertemuan antar desa dan dewan-dewan di tingkat yang lebih micro. Untuk mencegah

proyek munisipalis-libertarian agar tidak menjadi hampa atau digunakan untuk tujuan yang sangat sempit, Bookchin menyarankan prinsip konfederalisme, sebagai 'jaringan' majelis demokratis lokal (Bookchin 1993). Bagi Bookchin, konfederalisme sebagai prinsip organisasi sosial adalah cara untuk'mendemokratisasikan kesalingketergantungan tanpa menyerahkan prinsip-prinsip kontrol di tingkat lokal'. Pembentukan 'majelis demokratik-langsung di tingkat kota, desa, dan tingkatan yang lebih mikro, dalam bentuk konfederasi mereka akan menjadi alternatif terhadap konsep dan sistem negara-bangsa.[5]

Pembahasan kita tentang proyek konfederalisme demokratik dan proyek otonomi- demokratik menjadi bagian dari diskusi yang lebih umum dalam politik radikal dan Marxisme kontemporer. Sejak akhir 1970-an, pemahaman tentang politik radikal dalam kerangka Marxisme telah bergeser. Berfokus pada tiga pilar penting politik —pemikiran politik negara, kelas, dan partai— radikal mengambil bentuk 'politik yang melampaui negara, organisasi politik yang melampaui partai, dan subjektivitas politik yang melampaui kelas'[6] (Badiou 2002: 95-99). Hal ini, bisa kita katakan, adalah inti dari "demokrasi radikal" dan sebuah alternatif bagi penyerahan demokrasi yang dilakukan oleh neo-liberal kepada pasar. Ini adalah gagasan yang memberi dorongan baru bagi gerakan sosial dan politik radikal (kiri), dari "gerakan pembebasan" Amerika Latin, hingga demonstrasi anti-globalisme di AS dan Eropa. Di Timur Tengah, yang terus menjadi salah satu lanskap paling penting untuk konflik etnis dan agama, gerakan Kurdi yang dipimpin oleh PKK telah menggerakkan proses yang serupa melalui mempromosikan proyek demokrasi radikal.

Artikel ini terdiri dari lima bagian. Pertama, kita akan menelusuri evolusi pendekatan ideologis dan politik PKK terhadap demokrasi radikal pada tahun 2000an. Kemudian, kita akan membahas konsep konfederalisme dan otonomi seperti yang dikembangkan oleh Bookchin. Bagian ketiga melihat secara rinci proyek-proyek politik yang dikembangkan dalam konteks demokrasi radikal (republik demokratik, konfederalisme demokratik, dan otonomi demokratik), dengan mempertimbangkan implikasi teoritis dan dimensi politik mereka. Keempat,

pengamatan yang kami lakukan di tingkat lokal pada bulan Juli 2011 akan kami presentasikan disini. Kelima dan akhirnya, makna dan implikasi politis dari proyek demokrasi radikal ini untuk gerakan Kurdi di Turki akan dibahas di bagian ini.

PKK dan Reinvention Politik

Ketika PKK didirikan sebagai partai politik pada tahun 1978, ia memiliki struktur organisasi dengan tipe partai komunis klasik, dengan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat partai terkemuka dan Komite Eksekutif yang bertanggung jawab atas operasi secara langsung. Lembaga eksekutif tertinggi adalah Komite Sentral, dan Kongres Partai adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam partai ini. Namun, selama bertahun-tahun, PKK tumbuh lebih beragam, dan yang kami sebut sebagai PKK saat ini sebenarnya adalah sebuah partai dengan sistem yang jauh lebih kompleks, sebuah formasi partai dan organisasi yang terdiri dari beberapa komponen (termasuk PKK), sebuah partai bersama yang mengatur secara terpisah kaum wanita,[7] PKK memiliki organisasi serupa di Irak (*Kurdistan Democratic Solution Party*), Iran (*Free Life Party of Kurdistan*), dan Suriah (*Democratic Union Party*) [8], dan pasukan gerilyawan [9] yang terkait dengan partai-partai ini. Di samping kelompok partai ini, PKK membentuk institusi yang melaluinya integrasi dan koordinasi praktik politik berjalan. Hari ini, yang terpenting adalah *Union of Kurdistan Communities* (*Koma Civakên Kurdistan*, KCK), [10] yang pada dasarnya merupakan jaringan dewan desa, kota, dan daerah, yang majelisnya disebut Kongres Rakyat Kurdistan (*Kongra-Gel*).[11] Yang lainnya adalah Kongres Nasional Kurdistan (KNN),[12] kongres pan-Kurdistan, yang mencakup perwakilan dari berbagai partai politik di Kurdistan serta perwakilan dari diaspora Kurdi dan minoritas etnis dan agama di Kurdistan. Sulit untuk mewakili organisasi dengan bagan alur organisasi tradisional. Karena anggota dan simpatisan PKK menyebut Abdullah Öcalan sebagai matahari (*günes*), kita dapat mengembangkan analogi ini dan membandingkan organisasi kompleks partai dengan sistem planet: matahari adalah Abdullah Öcalan dan planet-planet adalah partai, tentara, dan institusi, yang berada di orbit disekitarnya.

Transisi organisasi PKK dari gerakan pembebasan nasional

klasik yang didasarkan pada prinsip Marxis-Leninis, kepada organisasi *sui-generis* dengan sosok Abdullah Öcalan sebagai "Raja Ilahi" (pemimpin tertinggi), telah berjalan seiring perkembangan ideologisnya. Awalnya (dalam manifesto 1978), pembentukan Persatuan Kurdistan dianggap terjadi bersamaan dengan penyatuan seluruh kekuatan revolusioner di Turki, kedua bangsa (Kurdi dan Turki) bergabung dalam perjuangan mereka untuk pembebasan. Namun, selama berlangsungnya eksistensi partai tersebut, Öcalan mencoba mengembangkan pemahaman asli tentang sosialisme, dan, terutama sejak penangkapannya, dia telah lebih jauh menguraikan pemahaman sosialisme dan revolusinya yang khas.

Setelah tahun 2000, kerangka ideologis PKK didirikan melalui serangkaian teks yang ditulis oleh Öcalan dan diajukan sebagai bagian dari pembelaan hukumnya ke pengadilan yang berbeda dimana kasusnya diadili. Diterbitkan dalam bahasa Kurdi dan Turki, serta bahasa-bahasa lain, teks pembelaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua: yang diajukan ke pengadilan Turki, dan yang diajukan ke pengadilan Eropa, ECtHR di Strasbourg, dan sebuah pengadilan di Athena dalam sebuah kasus mengenai pengusiran dirinya dari Yunani Kelompok pertama terdiri dari dua teks pembelaan: teks utama, diserahkan ke pengadilan di Imrali (pulau militer/penjara di mana Öcalan diadakan), dan sebuah lampiran, yang diajukan ke Pengadilan Banding di Ankara pada tahun 1999 dan ke sebuah pengadilan lokal di Urfa (sebuah kota di Turki tenggara) pada tahun 2001. Judul teks pertama ini diterbitkan sebagai '*Declaration on the Solution of the Kurdish Question*', dan '*Urfa: The Symbol of history, divinity and wretched[ness] in the basin of the Tigris-Euphrates*. Kelompok ke-dua teks pembelaan, diajukan ke ECtHR pada tahun 2001, ke pengadilan Athena pada tahun 2003, dan di ruang sidang ECtHR pada tahun 2004, terdiri dari dua buku yang terdiri dari tiga jilid. Buku pertama (dari dua jilid) diterbitkan dalam terjemahan bahasa Inggris dengan judul title *From Sumerian Clerical State towards People's Republic I-II* (2001), dengan buku kedua (dan volume ketiga) -yang dikenal di kalangan PKK sebagai '"Pembelaan Athena"- diterbitkan dengan judul *The Defense of Free Man* (2003) dan

Defending a People (2004).[13] Terakhir, Öcalan mengajukan teks pembelaan lainnya ke *ECtHR* di Strasbourg mengenai kasusnya untuk hak pengadilan yang adil. Dijelaskan oleh Öcalan sebagai problematisasi modernitas kapitalis, teks ini diterbitkan di Turki selama tahun 2009-10, dalam empat jilid.

Dalam pembelaannya, Öcalan mencoba mengembangkan gagasan tentang politik yang melampaui apa yang dia sebut 'nasionalisme primitif dan gerakan "kiri klasik". Yang disebut sebagai '"demokrasi radikal", ini berkembang dari waktu ke waktu karena tiga proyek republik demokratik, konfederalisme demokratik, dan otonomi demokratik (walaupun proyek konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik saling terkait erat dan dapat dianggap satu). Proyek republik demokratik tersebut bertujuan untuk mereformasi konstitusi politik Turki, melepaskan gagasan sebuah republik dari gagasan nasionalisme: "Dalam konteks proyek ini, penyusunan konstitusi baru menjadi tuntutan politik yang nyata terhadap bagian dari gerakan Kurdi. Dalam konstitusi Republik Turki, kewarganegaraan telah disamakan dengan bahasa Turki, yang secara historis membuat Kurdi tidak terlihat. Sebuah konstitusi baru, berikut, harus mendefinisikan kewarganegaraan dalam istilah sipil " (Casier et al 2011: 115).

Gagasan tentang konfederalisme demokratik didefinisikan sebagai model 'pemerintahan mandiri (*self-government)* demokratik' (Öcalan 2008: 32). Hal Ini sebagai proyek alternatif untuk demokratisasi, yang harus diatur dari bawah ke atas, dimulai dari tingkat lokal. 'Proyek ini', Öcalan berpendapat, 'membangun pemerintahan swadaya masyarakat lokal dan diselenggarakan dalam bentuk dewan terbuka, dewan kota, parlemen daerah, dan kongres yang lebih besar. Warga itu sendiri adalah agen dari pemerintahan mandiri (*self-government*) itu sendiri, bukan kebalikannya dari sistem otoritas negara. Proyek otonomi demokratik menyediakan sistem konfederalis dengan tujuan tertentu: pengembangan domain sosial, budaya, dan ekonomi sendiri, yang dengannya kontrol diri politik menjadi bermakna dan signifikan. Sebenarnya, dengan konfederalisme yang mengacu terutama pada hubungan administratif antara badan demokratik di tingkat lokal, dan

otonomi terhadap independensi ini, tampaknya ada ketegangan implisit antara gagasan otonomi demokratik dan konfederalisme demokratik, yang dapat menyebabkan mereka menjadi kurang terbungkus dari yang dianggap sebagai hal yang berlawanan.

Perbedaan utama antara proyek republik demokratik dan konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik adalah bahwa yang pertama di sebutkan memiliki negara dan definisi atas kewarganegaraan sebagai fokusnya, sementara yang terakhir yang disebutkan memiliki fokus pada pengembangan alternatif dari negara, dan menaruh harapan mereka pada swa-organisasi (*self-organisation*) warga. Ini adalah perkembangan alternatif dari negara yang akan kita fokuskan disini. Lebih dari sekedar perspektif organisasi, di mana proyek-proyek konfederalisme demokratisk dan otonomi demokratik dapat diorganisir, dan berpotensi saling bertentangan, kita harus mempertimbangkan konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik bersama-sama sebagai strategi yang dispositif: mereka memberi orientasi politik pada perjuangan kontemporer bangsa Kurdi di Turki

Konfederalisme dan otonomi

Dalam tahanan, Öcalan telah terinspirasi oleh tulisan-tulisan Murray Bookchin, yang, dalam beberapa kesempatan menulis tentang konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik.[14] Bagi Bookchin, ini menjadi dasar pemikiran-ulang politik modern dan sebuah rekonstruksi gagasan Kiri, isu yang telah menjadi perhatian utama Öcalan. 'Mungkin salah satu kegagalan terbesar dalam gerakan rekonstruksi sosial, tulis Murray Bookchin pada tahun 1991, khususnya merujuk pada kaum Kiri dan organisasi yang mengklaim dirinya sebagai penyambung lidah untuk orang-orang yang tertindas, 'adalah kurangnya peran politik mereka yang akan membawa rakyat melampaui batas yang ditetapkan oleh sang *status quo* (Bookchin 1991: 3). Bagi Bookchin, rekonstruksi sosial semacam itu harus melampaui fokus dari undang-undang, atau lebih spesifik lagi, gagasan dari negara-bangsa (Bookchin 1990: 13; 1991: 7).

Bookchin membedakan antara dua gagasan politik, model Hellenic dan model Romawi, yang memunculkan dua pemahaman pemerintah yang

berbeda: bentuk politik partisipatif-demokratik yang pertama, dan yang kedua berbentuk statis-sentralis (White 2008: 159). Model Romawi telah menjadi dominan di zaman modern, menginformasikan konstitusionalis Amerika dan Prancis di abad kedelapan belas, sementara model Athena ada sebagai arus balik bawah tanah, menemukan ekspresi di Komune Paris pada tahun 1871, dewan (soviet) di musim semi saat revolusi di Rusia pada tahun 1917, dan Revolusi Spanyol pada tahun 1936.[15] Model Romawi yang sangat statis dan terpusat, sebaliknya, tidak memiliki warga negara merdeka, namun hanyalah sekelompok subyek (Kropotkin:1897), namun model Hellenic memiliki peran kewarganegaraan yang aktif (Bookchin 1990: 11).

Bookchin memproyeksikan imajinasinya untuk pemulihan manusia sebagai warga negara dalam gagasan konfederalisme, yang didefinisikan sebagai 'saling keterkaitan masyarakat satu sama lain melalui deputi yang dapat diingat yang diamanatkan oleh majelis warga kota'. Bookchin menganggap ini sebagai 'alternatif atas sistem negara-bangsa' (Bookchin, 1991: 7). Di tempat lain, Bookchin (1990: 9) mendefinisikan konfederalisme sebagai "jaringan dewan administratif yang anggotanya dipilih dari aliansi demokratis tatap muka, di berbagai desa, kota, dan bahkan di lingkungan kecil di kota-kota besar." Dewan administratif ini adalah Hanya saja, badan yang diadministrasikan. Mereka dikontrol ketat dan tidak membuat sebuah kebijakan, yang merupakan kekuatan yang tetap berada di tangan masyarakat itu sendiri:

"Para anggota dewan ini diberi mandat, dapat di *recall*, dan bertanggung jawab kepada majelis yang memilih mereka untuk tujuan mengkoordinasikan dan mengelola kebijakan yang dirumuskan oleh majelis itu sendiri. Fungsi mereka dengan demikian merupakan administrasi yang praktis dan bukan pembuat kebijakan seperti fungsi dewan perwakilan di sistem pemerintahan republik." (Bookchin 1990: 10) [16]

Menurut Bookchin, konfederalisme mencapai perkembangan sepenuhnya dalam kaitannya dengan sebuah proyek otonomi, "ketika menempatkan perkebunan lokal, pabrik, dan perusahaan lain di tangan pemerintah

daerah", atau "ketika sebuah komunitas (...) mulai mengelola sumber ekonominya sendiri dalam cara yang saling terkait dengan komunitas lain" (Bookchin 1990:11). Dalam model ini, ekonomi ditempatkan di dalam wewenag dewan konfederasi, dan karena itu "tidak dapat kolektifisasi atau diprivatisasi, semua hal tersebut adalah milik umum"(Bookchin 1990: 10). Dengan demikian, konfederalisme dan otonomi adalah gagasan utama dalam "konfigurasi masyarakat radikal" Bookchin (Bookchin 1990:4). Dalam proyek konfederalisme dan otonomi ini, usaha (didefinisikan sebagai model jaringan dari organisasi mandiri lokal dan *self-administration*) dan tujuan akhir (didefinisikan sebagai *community controlled economies*). Dalam kombinasi, mereka dapat dianggap sebagai politik alternatif karena melampaui konsep-konsep dari negara-bangsa.

Dipengaruhi oleh gagasan ini, Öcalan mengembangkan pemahaman yang sama tentang konfederalisme. Sejalan dengan analisis historis peradabannya berdasarkan kritik terhadap negara, Öcalan mengutuk kegagalan sosialisme dan gerakan pembebasan nasional yang nyata, yang dianggap terjebak dalam gagasan bangsa dan negara. Sebagai gantinya, dia menjelaskan dampak berlarut-larut dari masyarakat Neolitik, yang nilai komunalnya tidak dapat sepenuhnya dihancurkan oleh perkembangan masyarakat hierarkis yang dibangun di atas negara. Nilai komunal tersebut — diringkas sebagai organisasi yang sadar akan gender, kehidupan yang sesuai dengan alam, dan masyarakat yang didasarkan pada solidaritas (pada dasarnya, adalah ungkapan feminisme, ekologi, dan sosialisme)— mendasari konsepsi Kongo tentang demokrasi dalam bentuk konfederalisme yang demokratik. Atas dasar nilai-nilai ini lah, Öcalan mengembangkan sebuah proyek konfederalisme demokratik yang diselenggarakan pada empat tingkat (Karasu 2009: 84-85). Di bagian bawah ada komune di desa dan distrik, yang saling terkait di tingkat desa, kota, dan kawasan. Selanjutnya adalah organisasi kategori sosial, seperti wanita dan pemuda. Tingkat organisasi lebih lanjut terjadi di ranah kultural, mengenai kerangka untuk identitas etnis, agama, budaya yang berbeda. Tingkat keempat dan terakhir adalah organisasi masyarakat sipil. Dalam pengertian inilah, konfederalisme demokratik,

melalui basisnya di majelis di tingkat desa, kabupaten, kota, dan daerah, mengacu pada pengorganisasian seluruh masyarakat dari bawah ke atas (Karasu 2009: 80). [17]

Membangun konfederalisme demokratik dan otonomi dalam konteks Kurdi

Sejak tahun 2005, PKK dan semua organisasi afiliasinya telah direstrukturisasi berdasarkan proyek ini atas nama Perhimpunan Komunitas Kurdistan (*Koma Civakên Kurdistan*, KCK), sebuah organisasi kemasyarakatan yang dipresentasikan sebagai alternatif negara-bangsa. Bertujuan untuk mengatur diri nya sendiri dari bawah ke atas dalam bentuk majelis, KCK adalah "gerakan yang berjuang untuk membangun demokrasinya sendiri, tidak didasarkan pada negara-negara yang ada atau melihat mereka sebagai rintangan" (PKK 2005: 175). Dalam teks pendiriannya, '"Kontrak KCK", tujuan utamanya didefinisikan dalam kaitannya dengan perjuangan untuk perluasan demokrasi radikal, yang didasarkan pada organisasi rakyat demokratis dan kekuasaan dalam pembuat keputusan.[18] Kontrak KCK menetapkan sebuah Mekanisme baru hubungan sosial yang melampaui mentalitas statistika. Dalam pengertian ini, konfederalisme yang demokratis, sebagai gagasan pengorganisasian utama KCK, berlaku dimanapun orang Kurdi tinggal, bahkan di Irak, di mana orang Kurdi memiliki hak konstitusional yang mencakup pemerintahannya sendiri secara mandiri (*self-governance*) wilayah mereka dalam struktur negara federal. Dalam proyek ini, ada dua faktor penentu: gagasan demokrasi sebagai kekuatan rakyat di dalam masyarakat (bukan sebagai bentuk pemerintahan), dan pengucilan negara dari gagasan ini. Konfederalisme demokratik sebagai bentuk sistem politik dan sosial di luar negara adalah sebuah proyek untuk kehidupan yang merdeka. Ini tidak ada hubungannya dengan pengakuan sebagai negara bagian. Meskipun negara bagian tidak mengenalinya, bangsa Kurdi akan membangunnya. Jika mereka mengenalinya, misalnya dalam sebuah proyek otonomi demokratik, akan lebih mudah untuk membangun sistem konfederal demokratik yang pada akhirnya akan menjadi produk dari perjuangan bangsa Kurdi sendiri (Karasu 2009: 216-17).[19] Oleh karena itu, proyek Kurdi yang baru telah melahirkan bentuk organisasi lain, Kongres Rakyat Demokratik (*Demokratik*

Toplum Kongresi, DTK), didasarkan atas argumen berikut:

"Hari ini kita memiliki beberapa dewan distrik dan kota, meski dalam tingkat lokal dan tidak memadai, Karena mereka tidak didirikan dengan baik, orang Kurdi masih membawa tuntutan mereka kedalam partai politik dan mencerminkannya melalui negara. [...] Jika orang Kurdi berkumpul di bawah atap kongres ini, mereka akan menjadi teman bicara untuk sebuah solusi. Dan negara, yang sampai pada kesepakatan dengan badan ini, akan terlepas dari struktur lamanya."[20]

Kongres yang dimaksud adalah majelis dewan lokal, bentuk konfederasi langsung demokrasi yang menurut Bookchin ada dalam karyanya tentang "munisipalis libertarian", dan bahwa Öcalan mengacu pada "demokrasi tanpa negara." Dengan demikian, DTK bukan sekadar organisasi seperti yang lainnya, namun merupakan bagian dari upaya untuk membentuk sebuah paradigma politik yang baru, yang didefinisikan oleh penggunaan secara langsung dan terus-menerus atas kekuatan rakyat melalui dewan desa dan kota. Sekitar 600 delegasi menghadiri pertemuan kongres (pendiri) pertama pada bulan Oktober 2007, di mana proyek untuk otonomi demokratis menjadi isu utama. Kongres yang berurutan telah diadakan sejak saat itu – yang keempat pada bulan Agustus 2010 dan yang kelima pada bulan Juli 2011– dan DTK sekarang memiliki ruang permanen yang terdiri dari 101 orang, dipilih dua kali setahun dari 850 delegasi (Akkaya dan Jongerden 2012).

DTK diatur di tingkat desa (*köy*), daerah pedesaan, (*belde*), lingkungan perkotaan (*mahalle*), distrik (*ilce*), kota (*kent*), dan wilayah (*bölge*), yang disebut sebagai 'utara Kurdistan'. Kongres memiliki seorang divan (komite eksekutif) yang terdiri dari lima orang, di antaranya seseorang bertindak sebagai juru bicara baik pria maupun wanita.[21]

Instrumental untuk perkembangan ini telah menjadi proses paralel dalam ranah politik konvensional, dengan partai pro-Kurdi menyuarakan otonomi demokratik sebagai proyek politiknya. Ini adalah pendahulu dari *the Peace and Democracy Party* (*Barış ve Demokrasi Partisi, BDP*), Partai Demokrat (*Topi Partisi, DTP*) yang telah menyelenggarakan DTK, dan pada Kongres ke-duanya,

sebuah dokumen berjudul '*Democratic Solution to the Kurdish Question*–Proyek Otonomi Demokratik' secara resmi diakui.

Dokumen ini terdiri dari tiga bagian, membahas "reformasi struktur administrasi politik Turki", "proposal untuk solusi ekonomi dan sosial daerah" dan '"rencana tindakan untuk penghentian bentrokan".[22] Laporan Kongres juga menyerukan reformasi radikal dalam struktur politik dan administrasi Turki untuk memastikan demokratisasi dan untuk mengembangkan pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan penguatan di tingkat lokal. Alih-alih otonomi berdasarkan "etnisitas" atau '"wilayah", ia menyarankan struktur regional dan lokal yang memungkinkan ekspresi perbedaan budaya. Pada Kongres yang sama dan sehubungan dengan itu, DTP menekankan pentingnya membangun majelis di setiap tingkat di masyarakat. Sejalan dengan gagasan untuk mengorganisir secara mandiri (*self-organisation*) dan otonom, pemerintah kota DTP memulai sebuah "layanan kota multi bahasa", yang memicu perdebatan sengit.[23] Tanda-tanda kota didirikan di wilayah Kurdi dan Turki, dan para penjaga toko setempat pun mengikutinya.

Semua aktivitas di tingkat pemerintah daerah telah berakar pada model *free municipalism* (*özgür belediyecilik modeli)*, yang diadopsi oleh DTP pada konferensi tiga hari pada bulan Februari 2008, yang mengambil konsep kewarganegaraan bebas (*özgür yurttas¸*) sebagai titik pangkal. Konsep ini mencakup dasar kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi, namun juga kebebasan identitas etnik, agama, budaya, dan bahasa, dan kebebasan untuk mengembangkan identitas budaya dan nasional. Model *free municipalism* bertujuan untuk mewujudkan badan administratif partisipatif dari bawah ke atas, dari tingkat lokal sampai provinsi, di mana layanan yang lebih baik akan diberikan dan masalah mengenai identitas akan dipecahkan. Gagasan tentang *free municipalism* adalah tema yang dibahas oleh Bookchin juga, dan memberi kita petunjuk bagaimana konfederalisme demokratik dapat diterjemahkan ke dalam otonomi demokratis.[24]

Yang penting, melalui kegiatan ini di tingkat pemerintah daerah, politik Kurdi mendapat supremasi dalam menyesuaikan

ruang yang mengacu pada "potensi gerakan sosial untuk mengubah struktur kekuasaan di pemerintahan tertentu" (Gambetti 2009: 44). Ruang publik bangsa Kurdi yang disesuaikan ini menandai pembukaan ruang politik dan sosial diferensial di dalam wilayah negara-bangsa '(Gambetti 2009: 60). Dalam pengertian ini, munisipalis yang berada di bawah kendali partai pro-Kurdi sejak tahun 1999 semakin membentuk semacam badan regional yang mengatur dirinya sendiri, yang disebut, berdasarkan kasus Diyarbakır, terlibat dalam "dekolonisasi" (Gambetti 2008). Menariknya, pada tahun 2010 dan 2011, seputar isu konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik bahwa gerakan Kurdi dan gerakan Kiri dan Hijau di Turki mulai mendirikan lagi majelisnya. Dengan demikian, proyek demokrasi radikal ini membawa janji penyelarasan politik yang lebih luas.

Pertemuan di tingkat lokal

Jadi apa sebenarnya yang terjadi di tingkat lokal? Apakah konfederalisme dan otonomi demokratik lebih dari sekedar slogan? Apakah itu dipraktekkan, dan kalau begitu bagaimana mereka mempraktikan hal itu? Kami mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini di kota Diyarbakır. Pada suatu malam musim panas di bulan Juli 2011, kami menyusuri jalan-jalan sempit di Bağlar, sebuah distrik yang ramai dan cukup miskin di dekat pusat kota, dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan dengan perwakilan sebuah dewan di lingkungan ini.

Dewan, kami diberitahu, adalah bagian dari sistem konfederalisme yang demokratik, sebuah proyek yang dibahas dan dikembangkan oleh gerakan Kurdi dalam beberapa tahun terakhir. Proyek konfederalisme yang demokratik, pemimpin partai lokal BDP di Diyarbakir mengatakan kepada kami, bahwa hal ini merupakan alternatif dari "kapitalisme, yang secara historis menemukan bentuk ideologis, organisasional, dan politiknya dalam negara-bangsa", dan juga model usang dari apa yang dulu menjadi "sosialisme sejati, yang 'gagal mengembangkan alternatif politik". Sebagai sebuah paradigma, seorang administrator partai setempat memberi tahu kami, konfederalisme demokratik 'menolak sentralisme dan negara serta menyambut baik pengorganisasian rakyat secara

mandiri dan tanggung jawab mereka atas urusan sehari-hari dan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, administrator partai menekankan, 'konfederalisme demokratik tidak berorientasi pada pengambilalihan kekuasaan negara, atau difokuskan pada negara, namun pada pengembangan bentuk kekuasaan alternatif melalui pengorganisasian secara mandiri. “konfederalisme Demokrat telah mengguncang kita”, salah satu informan kami menjelaskan. Ini bukan sesuatu yang hanya ditetapkan, tapi “apa yang dikembangkan sebagai sebuah proses”.

Jelaslah bahwa filosofi yang dijadikan penuntun telah diinternalisasi dengan baik di antara anggota partai di “ibu kota”' atau di “benteng” mereka, seperti Diyarbakir. Yang lebih menarik perhatian kamu, bagaimanapun juga, adalah bagaimana teori tersebut benar-benar terwujud di tingkat lokal, dalam pengaturan ruang kehidupan sehari-hari (dan terutama, dalam kehidupan orang-orang di daerah miskin Bag ̌lar dan Sur, yang bertentangan dengan mereka yang tinggal di komunitas terjaga keamanannya di lingkungan kota yang lebih makmur, Yenis ̧ehir dan Kayapinar). Bagaimana dewan ini benar-benar didirikan? Siapa anggotanya, dan bagaimana dewan bekerja? Dewan yang kami tuju terletak di lantai dasar sebuah gedung apartemen, bentuk utama akomodasi di lingkungan sekitar. Terlepas dari sebuah ruangan besar yang digunakan untuk pertemuan, ada sebuah dapur kecil, sebuah kantor, dan sebuah ruang pertemuan yang lebih kecil, yang disusun sebagai “kohesi” ('sudut oriental'), dengan karpet di lantai dan bantal di sampingnya, yang satu bisa duduk dan bersandar di dinding. Di papan buletin di ruang pertemuan ada sebuag undangan kepada dewan untuk hadir di pesta pernikahan dan perayaan lainnya.

Undangan tersebut merupakan bukti tingkat hubungan antara masyarakat dan dewan yang mendukung rasa subjektif aksesibilitas yang kami rasa, melampaui, kehangatan yang mungkin diharapkan akan diperluas ke pengunjung khusus melampaui, jarak yang sangat jauh dari jalan menuju tempat suci dalam organ pemerintahan ini, beberapa meter dari tempat ini, selanjutnya memberi kesaksian tentang kedekatannya dengan

kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, perbandingan yang mengundang dirinya sendiri bukan pada badan pemerintah biasa, dengan berbagai hambatan (administrasi) birokrasi dan lingkungan-sosial (terletak di lingkungan non-perumahan atau di atas pasar, dekorasi formal, akses oleh pengangkatan, penempatan staf oleh karyawan yang dibayar, dll.) yang menggabungkan tingkat emosional yang jauh melepaskannya dari pengalaman manusia sehari-hari dan dengan demikian dari orang biasa. Sebaliknya, adalah dengan fasilitas penjangkauan dan pusat, format kelembagaan desentralisasi yang muncul dalam penyediaan layanan selama beberapa dekade terakhir, termasuk di pemerintah daerah namun di sana, hanya tersisa pada tingkat pembangunan yang sangat rendah (umumnya terbatas pada fungsi tunggal, seperti perumahan, dan pada tingkat strategis diterapkan sedikit sembarangan).

Kami disambut oleh sekitar delapan orang, anggota dewan lingkungan sekitar (*mahalle meclisi*), yang berjumlah dua puluh anggota, semuanya dua belas laki-laki dan delapan perempuan. Lingkungan sekita ini memiliki populasi sekitar 60.000 orang (dari 350.000 yang tinggal di distrik Bağlar secara keseluruhan). Bagaimana anggota melihat peran mereka, apa persepsi mereka sendiri tentang apa yang mereka lakukan? “Tujuan kami”, ketua dewan menjelaskan, 'adalah menghadapi masalah dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, dan menyelesaikannya sendiri tanpa bergantung pada atau membutuhkan negara. Yang lain menambahkan bahwa “negara adalah punuk di belakang rakyat,” dan “kita mencoba untuk hidup tanpa negara”. Namun, mereka menambahkan, “gagasan tentang negara bersarang di benak orang, dan sulit membuat orang berpikir tentang politik tanpa membuat referensi terhadap negara, jadi kita berdua mempraktikkan pengorganisasian mandiri sekaligus belajar untuk mengerti apa itu dengan melakukannya”. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Ince (2010: 82) mengacu pada jenis proses tertentu sebagai kumpulan sarana dan tujuan: dengan mempraktekkan tujuan, orang belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Cakrawala tindakan Mengutip Eduardo Galeano, Ince berpendapat bahwa pemahaman ini

terbentang sebagai berikut: 'Utopia ada di cakrawala, ketika saya berjalan dua langkah, dibutuhkan dua langkah mundur ... Saya berjalan sepuluh langkah, dan ini adalah sepuluh langkah lebih jauh lagi. Untuk apa utopia ini? untuk berjalan. Dengan cara yang sama, anggota dewan memandang dewan tersebut sebagai upaya mempraktikkan pemerintahan mandiri dan belajar memahami arti pemerintahan mandiri dengan melakukan hal itu tersebut —belajar demokrasi dan belajar mengorganisir diri dengan mencoba untuk mewujudkannya dalam praktik, dan dalam kasus khusus ini, dengan mempraktikkan demokrasi dan pengorganisasian mandiri di tingkat lingkungan sekitar, alih-alih menuntut demokrasi dari negara.

Dewan di lingkungan sekitar mencoba dan bertujuan untuk membuat perbedaan di tingkat lokal, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari pandangan substantif, apa yang mereka lakukan, antara lain, menengahi konflik antara keluarga dan para pemilik toko, menyelenggarakan kursus untuk kaum muda (dalam musik, teater, melukis, dll.), Dan memberikan informasi dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap wanita. Sekali lagi, latar belakang isu-isu perempuan sangat jelas; penyediaan layanan bagi anak muda yang menonjol kontras dengan posisi yang umumnya kurang diperhatikan dalam pemerintah daerah konvensional (dan sekali lagi, seperti dalam kasus gender, alasan mengapa jenis lembaga ini dapat bekerja lebih baik untuk kaum muda dapat dicantumkan beberapa lama); dan dalam resolusi konflik lokal, nampaknya ada kuman gagasan bagi otoritas lokal yang mungkin telah terwujud di sini karena organisasi kecil yang diwakili oleh pendekatan bawah-atas terhadap pemerintahan. Tentu saja, ini baru permulaan: “kita tidak bisa mengerjakan semuanya: kita tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengatasi tingkat pengangguran dan masalah ekonomi yang tinggi”.

Tanggapan Akhir

Tanggapan berikut secara singkat mengulas topik yang ada dari perspektif sejarah Kurdi/Turki baru-baru ini, tentang implikasi politik dan signifikansi bagi gerakan Kurdi, dan kemungkinan bagi masa depan. Pertama, mobilisasi gerakan nasional Kurdi di sekitar proyek untuk otonomi

demokratik mengungkapkan tuntutan atas identitas yang meningkat dari orang Kurdi Turki (dan bangsa Kurdi pada umumnya). Ini diartikan sebagai era baru dalam politik Kurdi yang legal, di mana DTP, dan kemudian BDP, memainkan peran penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang ditujukan untuk penyelesaian masalah, berbeda dengan peran terbatas bangsa Kurdi secara legal sebelumnya. partai-partai (Partai rakyat Rakyat, Partai Demokrasi, Partai Demokrasi Rakyat, dan Partai Rakyat Demokratik) politik [25] semuanya dilarang, satu demi satu, oleh Mahkamah Konstitusi dan karenanya harus membatasi diri pada perjuangan untuk eksistensi diri. Memang, sebagian besar berada di bawah payung perlindungan otoritas lokal dan kontrol provinsi oleh partai Kurdi bahwa fondasi untuk otonomi konfederalisme demokratik dibangun.

Namun, setelah keberhasilan DTP dalam pemilihan lokal tahun 2009, di mana AKP yang berkuasa secara efektif kehilangan daerah pendudukan yang sebelumnya dominan di wilayah Kurdi, dan setelah kegagalan inisiatif pemerintah berikutnya (pembukaan sejarah baru bagi bangsa “Kurdi”), sebuah operasi polisi besar-besaran diluncurkan.Terhadap anggota DTP, yang kemudian organisasi tersebut dilarang. Keberhasilan pemilihan DTP digarisbawahi dengan cara yang sama oleh BDP dalam suara nasional selama tahun 2011 (sebuah referendum mengenai reformasi konstitusi dan pemilihan umum), dan usaha bersama oleh negara (peradilan) dan pemerintah (AKP) untuk melemahkan partai Kurdi.[26]

Selama dua tahun terakhir, hampir 9.000 anggota dan pegawai partai DTP dan BDP telah ditahan, dengan hampir empat ribu orang ditangkap, termasuk deputi terpilih, walikota, anggota dewan munisipalis, dan eksekutif partai (Bianet:2011). Tuduhan telah diajukan terhadap mereka karena 'mengganggu kesatuan negara dan integritas teritorialnya', “keanggotaan dan administrasi sebuah organisasi teroris” (baca: PKK) dan 'membantu dan mengakomodasi sebuah organisasi teroris' (KCK dikutip sebagai 'sayap urban dari PKK').

Pengadilan utama dari sekitar 150 terdakwa di Diyarbakır telah sangat kontroversial, karena pengadilan tersebut tidak mengizinkan penggunaan bahasa Kurdi dalam pidato-

pidato pembelaan. Di tempat lain, ada penuntutan dan penahan, termasuk hukuman penjara 91 tahun yang dijatuhkan kepada sebelas orang dalam Kasus Majelis Turki KC dimana tidak ada pembelaan yang dilakukan setelah permintaan untuk menggunakan Bahasa Kurdi dilarang (Bianet 2011). Sementara gerakan Kurdi mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang politik yang menyangkal negara, negara Turki membuat gerakan Kurdi menjadi perhatian utama.

Kekerasan adalah respon negara terhadap sifat radikal dari otonomi demokratik dan tantangan yang dihasilkan oleh konfederalisme demokratis. Upaya dari gerakan Kurdi pada inovasi radikal dan penemuan kembali politik jelas dianggap sebagai ancaman oleh pihak berwenang. Gagasan tentang otonomi demokratik dan konfederalisme demokratik radikal dalam arti bahwa mereka menekankan:

(1) pengorganisasian mandiri dan pemerintahan mandiri sebagai perspektif untuk melakukan politik dengan pendekatan *"D.I.Y'"* dan mereka tidak mentransfer kapasitas untuk melakukan politik kepada negara melalui sistem perwakilan; dan

(2) pemberlakuan tujuan masa depan dalam praktik sekarang, yang disebut oleh beberapa orang sebagai *"prefiguratif"* (Breines 1989; Downing 2001; Gordon 2008; Maeckelbergh 2009: 66-68; Milberry 2009). Pendekatan politis dengan cara yang *"D.I.Y"*, "adalah dengan cara menggunakan politik yang dapat mengasumsikan aksesibilitas dalam tradisi politik revolusioner yang terbaik, hal itu juga telah memikul tanggung jawab: semakin banyak orang dapat katakanlah membentuk pemerintah, semakin sedikit mereka — atau kita— dapat berlindung dalam pengunduran diri dan 'menyalahkan semuanya pada pemerintah".

Yang terakhir, "politik prefiguratif", bisa dibilang lebih penting lagi, membuat klaim atas pendekatan kita terhadap politik itu sendiri. '"Politik pilihan", menurut pendapat para aktivis, 'didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat masa depan adalah bagaimana kita bertindak di masa sekarang, jenis interaksi, proses, struktur, institusi, dan asosiasi apa yang kita ciptakan saat ini, dan bagaimana kita menjalani hidup kita.[27] Menurut Maeckelbergh (2009: 67), dalam praktik prefiguratif,

perbedaan temporal akan dihapus antara perjuangan di masa sekarang dan perjuangan menuju tujuan di masa depan. Dengan proyek konfederalisme demokratik dan otonomi demokratik, demokrasi bukanlah sebuah tuntutan reformasi, yang akhirnya berlangsung (atau tidak), tapi dipraktikkan, di sini dan saat ini juga, Inilah yang (Maeckelbergh 2009: 67) mengacu sebagai penggabungan sarana dan tujuan. Kedua proyek tersebut mempraktikkan prinsip mereka sekarang, bukannya membayangkannya sebagai fondasi masa depan yang lebih baik (Downing, 2001). Ini adalah cara yang sangat berbeda untuk memahami perubahan sosial, karena ia tidak mencoba mewujudkannya dengan merumuskan tujuan, berjuang untuk mendapatkan tujuan yang diterima oleh institusi ini, diikuti oleh implementasi selanjutnya dalam kebijakan dan rencana mereka.

Prefigurasi adalah membangun alternatif yang mewujudkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut, dan melakukannya di sini, hari ini, dan sekarang juga.

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, karena negara bukan kerangka acuan utama dalam konfederalisme demokratik, tuntutan atau harapan tidak diarahkan kepada negara, namun dibentuk dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang ditekankan oleh Karasu, sistem ini didasarkan pada *self-administration* dan *self-performance*, dan karenanya otonomi semacam itu tertanam (atau sebelumnya) dalam pendekatan konfederalisme demokratik: Dalam pemikiran borjuis, hak untuk menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam pengertian pembentukan negara. Tapi ini bukan pemahaman sosialis tentang penentuan nasib sendiri. Kami pikir konfederalisme yang demokratis adalah cara terbaik untuk mempraktikkan penentuan nasib kita sendiri. ... Sejak konfederalisme demokratik tidak menganggap negara sebagai bingkai utamanya, ini juga bukan tentang perubahan perbatasan. Sebaliknya, ini adalah cara berpikir dan melakukan hal yang benar-benar *non-statis*. Kerangka acuan dalam konfederalisme demokratik sedang mengembangkan sistem demokrasi rakyat berdasarkan pengorganisasian mandiri.

Dengan demikian, rakyat bisa mengembangkan institusi mereka sendiri, dewan. Jika

orang mengatur diri mereka sendiri dari bawah ke atas, dan membangun hubungan satu sama lain, dengan dewan-dewan yang lain, konfederalisme demokratik menjadikan perbatasan sebagai hal yang tidak penting '(Karasu 2009: 217-19 dan 208-10).

Akhirnya, dalam membahas apa proyek ini dimaksudkan untuk gerakan Kurdi di Turki, terbukti bahwa pengorganisasian semua segmen masyarakat dari bawah ke atas, di bawah asas konfederalisme dan otonomi demokratik, telah mencakup beberapa bidang kehidupan sosial yang sangat berbeda dan membutuhkan berbagai aktivitas. Proyek demokrasi radikal PKK, terutama gagasan tentang konfederalisme demokratik, mengembangkan sistem demokrasi dari bawah keatas melampaui batas-batas yang ada, bertujuan untuk membuat batas-batas tersebut fleksibel, keropos, dan (dalam jangka panjang) tidak relevan.

Sebenarnya, melalui proyek politik republik demokratik, otonomi demokratik, dan konfederalisme demokratik, PKK sedang mengembangkan sebuah agenda baru untuk penentuan nasib sendiri, sekaligus secara bersamaan melampaui konsep negara-bangsa. Yang lebih penting lagi, mungkin, PKK yang dikelola selama periode ini untuk mengumpulkan tuntutan identitas Kurdi ke dalam sebuah proyek demokrasi radikal. Hal ini dimungkinkan terutama melalui penjabaran atas pendekatan ideologis dan politik baru, yang menciptakan kesempatan bagi PKK untuk memperluas cakupan kepentingan dan aktivitasnya, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas untuk lingkup publik Kurdi. Dalam rangka transformasi masyarakat dalam semua aspeknya, daripada merebut kekuatan negara melalui perjuangan bersenjata, upaya PKK sekarang memungkinkan bidang operasi yang lebih luas.

Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa proyek demokrasi radikal PKK melibatkan agen aktif dalam bentuk kekuatan perjuangan, sebuah upaya berkelanjutan yang berkembang dari skala lokal,komunal ke regional dan seterusnya, bukan sebuah proyek politik yang dipaksakan dari atas. Dalam pengertian ini, konfederalisme demokratik dan proyek otonomi demokratik sebagaimana dirumuskan oleh gerakan Kurdi menghadirkan alternatif radikal yang melampaui batas-batas rezim

politik yang ada. Yang terpenting, hal tersebut didasarkan pada konsep demokrasi yang radikal yang bertujuan untuk memisahkan demokrasi dari nasionalisme, dengan mengecualikan negara dan bangsa, dan menganggap demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang tidak terbatas dan tidak bisa dimediasi oleh bentuk pemerintahan apapun. Oleh karena itu, proyek otonomi demokratik ini melampaui batas-batas rezim politik yang ada saat ini. Ini termasuk kerangka kerja yang diuraikan berdasarkan undang-undang keamanan Uni Eropa, yang menggunakan demokrasi liberal sebagai tolok ukurnya, walaupun ada diskusi berkelanjutan mengenai kesesuaian proposal demokrasi radikal untuk Kebijakan Regional Uni Eropa, karena hal itu bisa menjadi langkah yang berguna. Dalam perjalanan menuju solusi dari permasalah bangsa Kurdi (dengan mengatasi masalah sentralisme di Turki) singkatnya, gerakan Kurdi di Turki, yang telah mengembangkan sebuah proyek baru untuk demokrasi radikal berdasarkan konsepsi 'politik yang melampaui negara, organisasi politik yang melampaui partai, dan subjektivitas politik yang melampaui kelas' mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah tradisi sentralis kehidupan politik di Turki, serta pendekatan statistik dan pendekatan reduksionis kelas dari kaum Kiri.

catatan

[1] kami sangat berterimakasih pada Janet Biehl untuk pembacaan kritis dan komentarnya atas karya ini dalam versi draft.

[2] Ini tidak berarti bahwa perjuangan kekerasan harus selalu gagal, bahkan jika ia tidak berhasil mencapai tujuan akhirnya; Namun, hal ini berarti bahwa strategi peperangan rakyat tampaknya dianggap oleh PKK sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kemajuan dan kepentingan jangka panjangnya (sebagaimana terbukti, oleh gencatan senjata sepihak dengan durasi yang panjang).

[3] Hubungan yang tepat antara penangkapan Öcalan dan perubahan arah PKK yang tidak jelas, meskipun mungkin salah jika berpendapat bahwa yang satu menyebabkan yang lainnya.

[4] Di tempat lain, kita telah membahas proyek PKK untuk demokrasi radikal dalam kaitannya dengan karya Ernesto Laclau, Chantall Mouffe,

Antonio Negri, dan Michael Hardt (yang akan terbit). Di sini, kita membahas proyek PKK sehubungan dengan karya Murray Bookchin.

[5] Lahir di New York dari keluarga imigran Yahudi Rusia, Murray Bookchin (1921-2007) aktif dalam gerakan pemuda Partai Komunis Amerika Serikat pada usia belasan tahun, namun dia memutuskannya pada akhir tahun 1930an. Awalnya dia menyesuaikan diri dengan Trotsky dan Partai Pekerja Sosialis, namun dia memiliki banyak kesulitan dengan pandangan hierarkis dan sentralis mereka, dan dia mulai menganggap dirinya seorang sosialis libertarian sejak tahun 1950an dan seterusnya. *Dalam The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship* (1986; diterbitkan kembali dengan judul *Urbanization Without Cities* [1992] dan *From Urbanization to Cities* [1995]), dia 'menceritakan sejarah pengelolaan diri dan konfederalisme sipil dalam tradisi demokrasi Barat, mulai di Yunani kuno dan berlanjut melalui kota-kota Eropa abad pertengahan dan institusi populer dalam beberapa revolusi, terutama Amerika dan Prancis. Dari sinilah Bookchin merumuskan proyek politiknya 'munisipalis-libertarian' (http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives / bookchin / bio1.html).

[6] Newman mengkredit anarkisme dengan menjadi 'rujukan yang tidak dikenal' dalam perubahan ini untuk debat saat ini dalam filsafat politik radikal (Newman 2010). Dalam artikel ini, Newman juga mengakui sifat radikal dari bentuk-bentuk tertentu dari politik identitas di banyak masyarakat non-Barat, yang secara eksplisit mengacu pada perjuangan kaum Kurdi.

[7] Organisasi perempuan di PKK memiliki sejarah panjang. *Union of Women Guerrilla* pertama dibentuk pada tahun 1995, diikuti oleh partai perempuan pertama di tahun 1999. Nama partai perempuan tersebut telah berubah beberapa kali - saat ini beroperasi dengan nama Partai Kebebasan Perempuan Kurdistan (*Partîya Azadîya Jin a Kurdistan* , PAJK). PAJK berfungsi sebagai pusat ideologis untuk kelompok perempuan yang diselenggarakan secara mandiri, dengan Komunitas Asertif Wanita (*Koma Jinen Bilind*, KJB) sebagai organisasi terdepan dan *Union of Free Women* (*Yekîtîya Jinen Azad, YJA-STAR*) sebagai organisasi gerilyawan perempuan.

[8] Di Irak, *the Kurdistan Democratic Solution Party* (*Partiya Çareseriya Demokratik a Kurdistan, PÇDK*) dibentuk pada tahun 2002;

di Iran, *the Kurdistan Free Life Party* (*Partiya Jiyana Azad a Kurdistan, PJAK*) dibentuk pada tahun 2004; di Suriah, *the Democratic Union Party* (*Partiya Yekitiya Demokratik, PYD*) juga didirikan pada tahun 2004.

[9] pasukan gerilya diatur terutama ke dalam tiga badan: Pasukan Pertahanan Rakyat (*Hêzên Parastina Gel, HPG*), yang merupakan organisasi militer gerakan partai; Pasukan Kurdistan Timur (*Hezî Rojhelatî Kurdistan, HRK*), yang bekerja sejajar dengan tujuan politik PJAK; dan YJA-STAR, organisasi gerilyawan wanita.

[10] Dewan asosiasi di Kurdistan (*Koma Komalan Kurdistan*, KKK), yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Persatuan Kurdistan (*Koma Civakên Kurdistan*, KCK), keduanya merupakan konsep yang mewujudkan gagasan tentang konfederalisme demokratik yang dikembangkan oleh Öcalan, dan sebuah organisasi kemasyarakatan yang dipresentasikan. sebagai alternative bagi negara-bangsa dan yang Öcalan lihat sebagai model untuk penyelesaian masalah di Timur-Tengah. Di dalam kompleks partai PKK, KCK dapat dianggap sebagai badan eksekutif, dengan semua pihak dan organisasi mengkoordinasikan dirinya dengan badan tersebut. Lihat PKK 2005, 175-243.

[11] *Kongra-Gel* adalah front rakyat didalam kompleks PKK (PKK 2005: 97) dan sampai batas tertentu mengambil alih fungsi Front Pembebasan Kurdistan Nasional (*Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, ERNK*), yang dihapus pada tahun 2000. Ini dapat dianggap badan legislatif, seperti yang terlihat dari namanya, yang berarti Kongres Rakyat.

[12] Kongres Nasional Kurdistan (*Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê, KNK*) adalah sebuah organisasi payung pan-Kurdistan yang terdiri dari perwakilan diaspora Kurdi di Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Asia, serta perwakilan partai politik dari semua bagian Kurdistan, lembaga agama dan budaya, entitas politik independen dan intelektual, dan kelompok etnis non-Kurdi.

[13] Buku pertama diterbitkan dalam bahasa Inggris, dalam dua jilid: *Prison Writings: The Roots of Civilization* (2007), dan *Prison Writings: The PKK and the Kurdish Question in the 21st century* (2011). Untuk ulasan volume pertama, lihat Newens (2007), dan untuk keduanya, lihat Gunter (2007, 2011).

[14] Dalam "catatan penjara"nya, yaitu ringkasan pidatonya dengan para pengacaranya, Öcalan mengacu pada Bookchin dalam beberapa kesempatan. Pada periode 2002-2008, ada rujukan ke Bookchin dalam catatan tertanggal 28 Agustus 2002, 9 Juni 2004, 1 September 2004, 1 Desember 2004, 4 Mei 2005, 22 November 2006, dan 18 Juni 2008. Öcalan merekomendasikan agar Para pengikutnya membaca Bookchin dan mempraktikkan apa yang mereka temukan di sana.

[15] Bookchin mengagumi dan sering menyebutkan contoh demokrasi dewan revolusioner ini: Komune Paris 1871, Rusia tahun 1905 dan 1917, dan Spanyol pada tahun 1936. Tetapi saat dia menjelaskan, ini adalah contoh demokrasi dewan, bukan demokrasi majelis. Contoh-contoh 'tatap muka' atau demokrasi majemuk sangat langka dalam sejarah, namun lebih penting lagi sebagai preseden: selain Athena (minus patriarki dan perbudakan), majelis pertemuan kota New England pada Revolusi Amerika (1770-an) dan majelis warga Paris di Paris tahun 1793. Bookchin pertama kali menulis tentang mereka dalam judul *Forms of Freedom* (1968) dan sering menyebutkannya dalam beberapa dasawarsa sesudahnya. Lihat juga *The Third Revolution*, jilid 1 (1996).
16 Oleh karena itu, tidak ada fiksi rasionalis tentang 'kontrak sosial', di mana banyak persetujuan untuk diperintah oleh beberapa orang untuk kepentingan banyak orang. Konsepsi Pencerahan ini, akan diperdebatkan, pada dasarnya dioperasikan sebagai pembenaran untuk perluasan kekuasaan berbasis kapital dari aristokrasi ke borjuasi.

[17]Gagasan Öcalan tentang *'bottom-up'*, oleh karena itu, tidak persis (atau hanya) skala geografi / numerik biasa, berasal dari kecil / lokal sampai yang besar / regional, tapi (juga) yang lebih abstrak yang terdiri dari tingkat budaya, yang dapat dikategorikan naik dari komunal / parokial ke masyarakat / kategoris.

[18]http://www.ygk-info.com/Onderlik/sozlesme/index.html. (Pengantar, yang terdiri dari Deklarasi Konfedariatisme Demokratik tahun 2006 di Kurdistan, tersedia dalam bahasa Inggris di http://www.freemedialibrary.com). Terjemahan bahasa Inggris 'kontrak' (Kurdi: Peyman, Turkish: sözles¸me) dapat dipahami sebagai indikasi posisinya sebagai alternatif kontrak sosialnya Rousseau.

[19] Isu pengakuan negara mengundang pertanyaan tentang tanggapan negara lain, termasuk yang sebenarnya sedang diikuti: yaitu,

penindasan.

[20] Kürt Sorununda Çözüme Dog˘ru Demokratik Özerklik 2009: 95.

[21] Struktur organisasi umum DTK adalah sebagai berikut:

Majelis Umum (850 delegasi): Dari 850 delegasi, 500 orang dipilih dari populasi, 300 delegasi dipilih sebagai wakil politik - anggota parlemen, walikota dan anggota dewan provinsi dari partai politik Kurdi, Partai Perdamaian dan Demokrasi (*Barıs¸ Demokrasi Partisi*, *BDP*), dan lainnya yang telah terpilih dalam forum politik konvensional - dan 50 diperuntukkan bagi perwakilan agama minoritas, akademisi, atau orang lain yang memiliki keahlian khusus. Untuk pemilihan 500 delegasi 'populer' tahun 2011, pemilihan diselenggarakan di 43 distrik.

Kamar Permanen: 101 delegasi

Dewan Koordinasi: 13 delegasi (termasuk dua *co-chairs*; satu pria dan satu wanita)

Komite Eksekutif: lima delegasi.

Struktur ini diperbesar lagi dengan majelis daerah (setidaknya 75 delegasi), majelis kota (setidaknya 25 delegasi), majelis distrik (kota sedikitnya 15 delegasi), dan majelis desa dan lingkungan yang lebih kecil (setidaknya tujuh delegasi). Ada juga panitia / komisi yang berbeda di DTK yaitu: Komisi Status dan Komisi Hukum, Komisi Ekologi dan Pemerintahan Daerah, Komisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Komisi Komisi Kebijakan dan Komisi Pendidikan, Komisi Kesamaan Pria-Wanita, Komisi Perempuan, Komisi Pemuda, Budaya - Komisi Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan, Komisi kepercayaan, Komisi Diplomasi, dan Komisi Organisasi.

[22] Dokumen ini dapat diakses secara online di situs Institut Kurdi di Brussels. http://kurdishinstitute.be/english/5395-dtp-democratic-society-party.html.

[23] Pada tahun 2007, walikota Sur di Diyarbakır, Abdullah Demirbas, menawarkan layanan multibahasa munisipalis di wilayah Kurdi, Armenia, dan Suriah,Turki, terutama di meja resepsionis kota dan melalui saluran telepon. munisipalis juga menerbitkan majalah anak-

anak dalam semua bahasa dan menyiapkan buku cerita untuk anak-anak Kurdi. Karena proyek multibahasa ini, dewan munisipalasi dibubarkan, dan Demirbas dicopot dari kantornya dan dituduh menyalahgunakan posisi dan melanggar undang-undang alfabet Turki (dia kemudian dipilih kembali dengan pemungutan suara yang lebih banyak).

[24] Pendekatan konfederalis, menurut Bookchin, menyerukan pemusnahan ekonomi: 'Ia mengusulkan bahwa tanah dan perusahaan ditempatkan lebih jauh di dalam domain masyarakat [,] lebih tepatnya, domain majelis bebas dan deputi mereka di dewan konfederasi . Bagaimana pekerjaan yang harus direncanakan, teknologi apa yang harus digunakan, bagaimana barang harus didistribusikan adalah pertanyaan yang hanya bisa dipecahkan dalam praktiknya. (...) Dalam ekonomi kota seperti itu - konfederasi, saling bergantung, dan rasional menurut standar ekologi, bukan hanya teknologi, kita akan mengharapkan bahwa kepentingan khusus yang membagi orang hari ini menjadi pekerja, profesional, manajer, dan sejenisnya akan disatukan menjadi kepentingan umum di mana orang melihat diri mereka sebagai warga yang dipandu secara ketat oleh kebutuhan masyarakat dan wilayah mereka '(Bookchin 1991: 9).

[25] HEP (*Halkın Emek Partisi, People's Labour Party*), DEP (*Demokrasi Partisi, Democracy Party*), HADEP (*Halkın Demokrasi Partisi, People's Democracy Party*), DEHAP (*Demokratik Halk Partisi, Democratic People's Party*).

[26] Untuk tinjauan dan analisis sejarah ini, lihat Casier, Hilton & Jongerden (2009); Casier, Jongerden & Walker, (2011).

[27] http://interactivist.autonomedia.org/node/935.

Referensi

Akkaya, A.H. and J. Jongerden. (2011) 'The PKK in 2000s: Continuity through breaks?' in M. Casier and J. Jongerden (eds.) Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, London and New York: Routledge.

—— (2012). 'Reassembling the Political: The PKK and the project of Radical Democracy', European Journal of Turkish Studies. 14. Online.

Available HTTP: <http://ejts.revues.org/index4615.html> (accessed 21 December 2012).

Badiou, A. (2002) Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, London: Verso. Bianet. (2011a) '7748 people in custody, 3895 arrested in 30 months', Bianet.org, 7 October, Online. Available HTTP: <http://bianet.org/english/minorities/133252- 7748> (accessed 21 December 2012).

—— (2011b) 'Agˇrı KCK trial: prison sentences of almost 92 years', Bianet.org. 16 June, -forocalan.com/english/download/review_michael_gunther.pdf> (accessed 27 December 2012).

—— (2011) 'Book review: Prison writings: The PKK and the Kurdish Question in the 21st century', Middle East Policy, 18 (3). Online. Available HTTP: <http:// www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/prison-writings-pkk-and-kurdish. question-21st-century> (accessed 2 December 2012).

Ince, A.E.J. (2010) Organising Anarchy: Spatial Strategy, Prefiguration, and the Politics of Everyday Life, unpublished PhD Thesis, London: University of London.

Karasu, M. (2009) Radikal Demokrasi, Neuss: Mezopotamya Yayınları.

Kropotkin, P. (1897) 'The State: It's historical role'. Online. Available HTTP: <http:// www.panarchy.org/kropotkin/1897.state.html> (accessed 28 November 2012).

Kürt Sorununda Çözüme Dogˇru Demokratik Özerklik. (2009) Wes¸anên Serxwebûn: 146. Lenin, V. I. (1914) The Right of Nations to Self-Determination. Online. Available HTTP: <http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/ch01.htm> (accessed 21 December 2012).

Maeckelbergh, M. (2009) The Will of the Many: How the Alterglobalization Movement is Changing the Face of Democracy, London: Pluto Press.

Milberry, K. (2009) Geeks and Global Justice: Another (Cyber)world is Possible, unpublished PhD Thesis, Simon Fraser University.

Newens, S. (2007) 'Book Review of Ocalan's Prison Writings: The Roots of Civilisation', The Spokesman Journal, 95, Online. Available HTTP: <http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/95Stan%20Newens%20rev.pdf> (accessed 12 December 2012).

Newman, S. (2010) 'The horizon of anarchy: Anarchism and contemporary radical thought', Theory and Event, 13(2).

Öcalan, A. (1999) Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question, London: Mesopotamian Publishers. Online. Available HTTP:
—— (2007) Prison Writings: The Roots of Civilization, London and Ann Arbor:Pluto Press.
—— (2008) War and Peace in Kurdistan. Cologne: International Initiative Freedom for Öcalan – Peace in Kurdistan.
—— (2011) Prison writings: The PKK and the Kurdish Question in the 21st century, London: Transmedia Publishing ltd.

PKK. (2005) Partiya Karkerên Kurdistan.PKK Yeniden Ins¸a Kongre Belgeleri, Istanbul: Çetin Yayınları.

Üstündag˘, E. (2010) 'Solution for Kurdish question suits EU accession process'. Online. Available HTTP: <http://www.bianet.org/english/english/123087-possiblesolution-for-kurdish-question-suits-eu-accession-process> (accessed 15 January 2013)

White, D. F. (2008) Bookchin: A Critical Appraisal, London: Pluto Press.

Judul Asli: Confederalism and autonomy in Turkey: The Kurdistan Workers Party and the Reinvention of Democracy
Penulis: Akkaya,A.H. dan Jongerden,J.P
Pertama kali terbitpada: Gunes, C., Zeydanliogu, W. (2013) The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconcilation. London:Routledge (halaman 304)
Pengalih bahasa: wisnuprimason

Membela Revolusi Suriah:

Laporan mencenangkan yang di tulis Farshad Azadian dan Muhammed Elsalem, keduanya menyelidiki peristiwa yang terjadi di suriah melalui perspektif marxian, mengenai apa, bagaimana dan mengapa revolusi pecah di Suriah dan bagaimana peranan kaum imperialis Turki, AS, Iran, Rusia dan Arab Saudi dalam membajak gerakan rakyat tepat sebelum ISIS membajak sepenuhnya gerakan rakyat.

Murray Bookchin dan Perlawanan Kaum Kurdi:

Bagaimana jika sebuah gagasan radikal di implementasikan di tempat yang tak terbayangkan sebelumnya? Joris Leverink melaporkan implementasi dari gagasan Murray Bookchin yang di sesuaikan dengan kearifan lokal khas Timur-Tengah.

Otonomi di Timur-Tengah:

Dari mana asalnya dan mengapa kelompok fasis agama bersenjata seperti Al-Qaeda dan ISIS bisa mewabah di Timur-Tengah? dan apa solusi dari, tidak hanya menanggulangi fasisme seperti ISIS, tapi juga kekerasan yang dilakukan oleh negara, sardar saadi akan menjawab semua pertanyaan tersebut.

Konfederalisme dan Otonomi di Turki:

Apa yang melatarbelakangi tranformasi radikal kelompok revolusioner kurdistan dari perjuangan mendirikan negara kurdi yang merdeka menuju bentuk demokrasi yang radikal, meninggalkan konsep negar-bangsa dan mengejar bentuk masyarakat baru yang lebih demokraktis, ekologis dan feminis. Ahmet Hamdi Akkaya dan Josst Jongerden dengan baik mengabarkan penelitiannya dilapangan.

anti-copyright zine unit.
surel kami di:
cikudapapers@gmail.com